



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP
2017

DENPASAR 2018



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugrahaNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017 dapat diselesaikan, sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Denpasar.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016–2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan





Good Governance dan *Clean Government*. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Denpasar tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2017 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan serta meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Denpasar, 30 Maret 2018



Plt. Walikota Denpasar

Gusti Ngurah Jaya Negara





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kondisi Kota Denpasar	2
B.1. Kondisi Geografis	2
B.2. Kondisi Demografis	4
B.3. Pertumbuhan Ekonomi	6
C. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok serta Struktur Organisasi	10
C.1. Kedudukan	10
C.2. Kewenangan dan Tugas Pokok	11
C.3. Struktur Organisasi	13
D. Aparatur Pemerintah	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	17
B. Perjanjian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017 ...	34
B. Akuntabilitas Keuangan.....	101
C. Analisa Efisiensi	106
BAB IV PENUTUP	109
LAMPIRAN	111





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Luas Wilayah Kota Denpasar menurut Penggunaan Lahan (Hektar) Tahun 2012–2016	4
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Denpasar Tahun 2016	5
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Kota Denpasar usia 15 Tahun keatas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2016	6
Tabel 1.4	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Denpasar Menurut Lapangan Usaha, 2013-2016 (Persen)	9
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar	24
Tabel 2.2	Tujuan , Sasaran dan Anggaran Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017	29
Tabel 3.1	Capaian Kinerja	34
Tabel 3.2	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1	36
Tabel 3.3	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2	41
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3	44
Tabel 3.5	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4	46
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5	49
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6	62
Tabel 3.8	Tabel Capaian Indikator Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2017	63
Tabel 3.9	Indikator Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2014-2016.....	65
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7	67
Tabel 3.11	Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak Kota Denpasar Tahun 2012-2016	68
Tabel 3.12	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8	69
Tabel 3.13	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9	72
Tabel 3.14	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10	76





Tabel 3.15	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11	81
Tabel 3.16	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12.....	82
Tabel 3.17	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13.....	85
Tabel 3.18	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14.....	92
Tabel 3.19	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15.....	96
Tabel 3.20	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16.....	99
Tabel 3.21	Komposisi Belanja Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Sebelum Dilakukan AuditBPKRI)	102
Tabel 3.22	Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Denpasar Per Sasaran Strategis Tahun 2017.....	103
Tabel 3.23	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasarn Pemerintah Kota Denpasar.....	105
Tabel 3.24	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	108





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar	3
Gambar 1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar 2011-2016 (Persen)	7
Gambar 1.3	Struktur Organisasi	14
Gambar 3.1	Grafik Capaian Kinerja	34
Gambar 3.2	Jumlah Penduduk Miskin di Kota Denpasar Tahun 2013-2017	45
Gambar 3.3	Presentase Penduduk Miskin di Kota Denpasar Tahun 2013-2017	34
Gambar 3.4	Pelaksanaan Job Fair di Kota Denpasar	47
Gambar 3.5	Para pelamar kerja sedang melihat tawaran kerja yang disediakan oleh berbagai perusahaan di Stand Job Fair 2017, Are Parkir Utara Lapangan Lumintang, Denpasar	48
Gambar 3.6	angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Denpasar Tahun 2013-2017	50
Gambar 3.7	Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar Tahun 2013-2017	52
Gambar 3.8	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kota Denpasar Tahun 2013 sampai dengan 2017	54
Gambar 3.9	Persentase Ibu Nifas Yang Mendapatkan Kapsul Vitamin A Menurut Puskesmas di Kota Denpasar Tahun 2017	55
Gambar 3.10	Tren persentase Rumah Tangga ber-PHBS di Kota Denpasar Tahun 2013-s/d 2017	56
Gambar 3.11	Walikota Denpasar (Bapak I.B Rai Dharmawijaya Mantra) menerima Piagam Penghargaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Kementerian Keuangan RI dengan Predikat WTP	77
Gambar 3.12	Aplikasi e-kinerja Pemerintah Kota Denpasar	79
Gambar 3.13	Walikota Denpasar menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Koperasi Berprestasi	84
Gambar 3.14	Pembinaan ke Lapangan bagi UMKM Kota Denpasar	86





Gambar 3.15	Pelaksanaan Kemitraan Ke Lombok bagi UMKM terkait dalam Bahan Baku	88
Gambar 3.16	Fasilitas dengan mengikutsertakan UMKM kota Denpasar pada Pameran Inacraft di Jakarta Convention Centre Jakarta.....	89
Gambar 3.17	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Koperasi bagi Pengelola Koperasi Untuk Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Koperasi	90
Gambar 3.18	Pembinaan Kepatuhan Kepada Koperasi.....	91
Gambar 3.19	Jumlah Investor Luar Daerah di Kota Denpasar Tahun 2016-2017	93
Gambar 3.20	Jumlah Investasi di Kota Denpasar Tahun 2014-2017	93
Gambar 3.21	Promosi Pariwisata Budaya Kota Denpasar di TMMI Jakarta	95





RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Denpasar berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan diandalkan.

Tahun 2017 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tersebut untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan 5 Misi, 5 Tujuan, 16 Sasaran dan 29 Indikator Sasaran.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- Misi 1. terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja :
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran atau 33,33% kategori baik sekali (melampaui target), 1 indikator sasaran atau 33,33% kategori baik (belum mencapai target), dan 1 indikator sasaran atau 33,33% nilainya belum keluar.
- Misi 2. terdapat 1 tujuan, 7 sasaran dan 12 indikator kinerja :
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 4 indikator sasaran atau 33,33% kategori baik sekali (melampaui target), 2 indikator sasaran atau 16,67% kategori baik (mencapai target), 2 indikator sasaran atau 16,67% kategori baik (belum mencapai target), 1 indikator sasaran atau 8,33%





kategori kurang, dan 3 indikator sasaran atau 25,00% belum ada nilai.

- Misi 3. terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja :
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran atau 33,33% kategori baik sekali (melampaui target), dan 2 indikator sasaran atau 66,67% kategori baik (mencapai target).
- Misi 4. terdapat 1 tujuan, 5 sasaran dan 9 indikator kinerja :
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 indikator sasaran atau 33,33% kategori baik sekali (melampaui target), 5 indikator sasaran atau 55,56% kategori baik (mencapai target), 1 indikator atau 11,11% kategori baik (belum mencapai target)
- Misi 5 terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator kinerja :
 - ✓ Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran atau 50,00% kategori baik (belum mencapai target), dan 1 indikator sasaran belum ada realisasi dari Badan Pusat Statistik.

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 16 sasaran yang mencakup 29 indikator sasaran, diketahui bahwa 9 indikator sasaran atau 31,03% Baik Sekali (melampaui target), 9 indikator sasaran atau 31,03% Baik (mencapai target), dan 5 indikator sasaran atau 17,24% kategori baik (belum mencapai target), 1 indikator sasaran atau 3,45% kategori kurang, dan 5 indikator sasaran atau 17,24% realisasi nilai capaian kinerja belum dirilis. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 105,87% atau bermakna Baik Sekali. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2017 Baik Sekali.





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan upaya dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bertitik tolak dari RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang





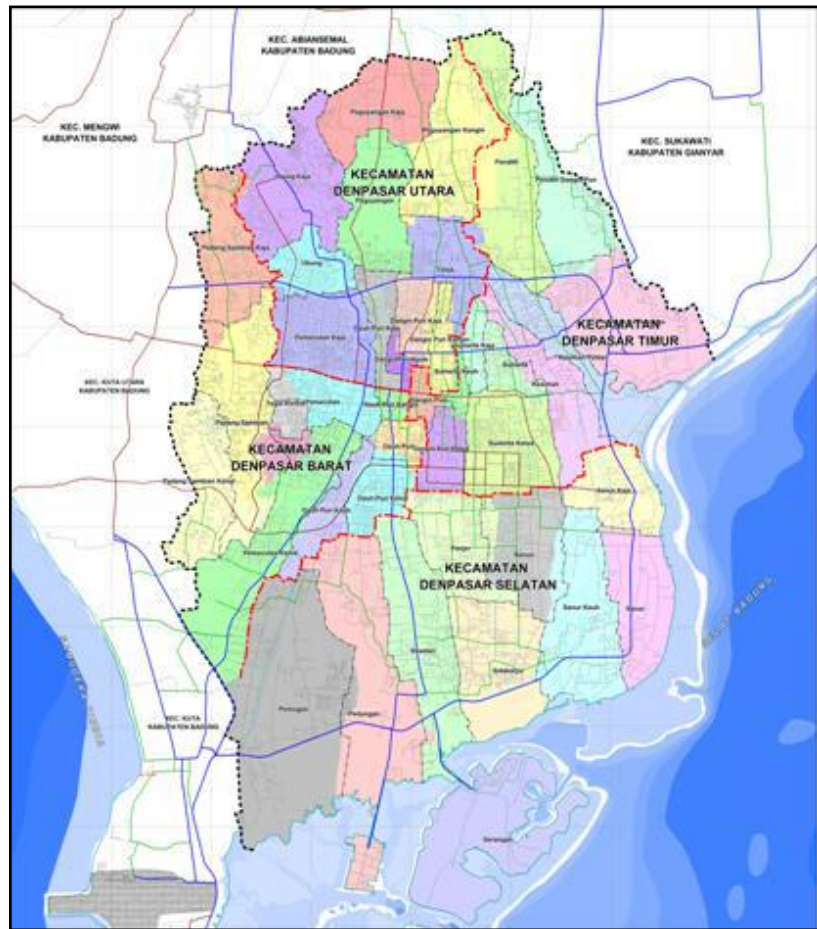
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta hasil Reviu sasaran dan Indikator RPJMD Kota Denpasar, maka penyusunan LAKIP Tahun 2017 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LAKIP Kota Denpasar Tahun 2017 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota kepada Presiden ini disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2017 yaitu tahun Pertama RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

B. Kondisi Kota Denpasar

B.1. Kondisi Geografis

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,78 km² (2,27 persen) dari luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi Kota Denpasar terdiri dari 4 wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari keempat kecamatan tersebut berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km² (39,12 persen). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,12 km² (24,35 persen), dan Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,13 km² (18,88 persen). Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur dengan luas wilayah 22,54 km² (17,64 persen).





Gambar 1.1.
Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar

Batas wilayah Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Badung di sebelah Utara, Barat dan Selatan sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Selat Lombok, secara rinci batas wilayah Kota Denpasar antara lain:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung).
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) dan Selat Badung.
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa.
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung).





Luas wilayah Kota Denpasar menurut penggunaan tanah sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti jalan, permukiman, perkantoran dan lainnya. Luas lahan pertanian selama 5 tahun (2011-2015) berkurang seluas 124 Ha atau rata-rata berkurang per tahun seluas 24,8 Ha. Alih fungsi lahan pertanian baik lahan sawah maupun lahan pertanian bukan sawah sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti pekarangan, pemukiman dan jalan serta lainnya. Secara rinci penggunaan lahan di Kota Denpasar tahun 2012-2016 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1.

Luas Wilayah Kota Denpasar menurut Penggunaan Lahan (Hektar)
Tahun 2012 - 2016

No.	Penggunaan Lahan	2012	2013	2014	2015	2016
1	2		4	5	6	7
1	Lahan Pertanian	3.035	3.022	3.014	2.989	2.954
1.1	Lahan Sawah Irigasi	2.519	2.506	2.500	2.479	2.444
1.2	Lahan Pertanian Bukan Sawah	516	516	516	516	510
	a Tegalan	396	396	396	385	390
	b Perkebunan	35	35	35	35	35
	c Hutan Rakyat	75	75	75	75	75
	d Lainnya	10	10	10	10	10
2	Lahan Bukan Pertanian (Pekarangan, Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll)	9.743	9.756	9.762	9.789	9.824
	Jumlah	12.778	12.778	12.778	12.778	12.778

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2017

B.2. Kondisi Demografis

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan





pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah social dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Jumlah penduduk Kota Denpasar pada tahun 2016 mencapai 897.300 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 458.300 jiwa (51,08%) dan jumlah penduduk perempuan 439.000 jiwa (48,92%). Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 7.022 jiwa/km² dari luas wilayah sebesar 127,78 km².

Tabel 1.2.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kota Denpasar Tahun 2016

No	Kelompok Umur / Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	0 - 4	39.000	37.500	76.500
2	5 - 9	37.400	35.200	72.600
3	10 - 14	34.500	33.200	67.700
4	15 - 19	35.100	37.000	72.100
5	20 - 24	48.300	48.600	96.900
6	25 - 29	49.400	46.100	95.500
7	30 - 34	43.600	40.700	84.300
8	35 - 39	39.500	38.300	77.800
9	40 - 44	39.000	35.700	74.700
10	45 - 49	31.500	28.400	59.900
11	50 - 54	22.900	20.500	43.400
12	55 - 59	15.800	14.600	30.400
13	60 - 64	9.800	9.000	18.800
14	65 +	12.500	14.200	26.700
	JUMLAH	458.300	439.000	897.300

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2017

Penduduk Kota Denpasar sebagian besar bermata pencaharian pada lapangan usaha Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel yaitu sejumlah 220.739 jiwa atau 47,11% dari Jumlah Penduduk yang bekerja di Kota Denpasar tahun 2015. Secara





terperinci jumlah penduduk Kota Denpasar yang berusia 15 tahun keatas yang bekerja berdasarkan lapangan usaha, diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.3.
Jumlah Penduduk Kota Denpasar Usia 15 tahun keatas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha, Tahun 2016

No	Lapangan Usaha	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan	6.144	1,31
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0,00
3	Industri Pengolahan	48.863	10,43
4	Listrik, Gas dan Air	566	0,12
5	Bangunan	37.620	8,03
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel	220.739	47,11
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	25.912	5,53
8	Keuangan, Asuransi dan Usaha Persewaan Bangunan	30.745	6,56
9	Jasa Kemasyarakatan Sosial, dan Perseorangan	97.926	20,90
10	Lainnya	0	0,00
	Jumlah	468.515	100,00

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2017

B.3. Pertumbuhan Ekonomi

Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan) di daerah atau wilayah tersebut. Perubahan nilai PDRB terutama atas dasar harga konstan (riil) yang dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi dinilai sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah disamping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2017

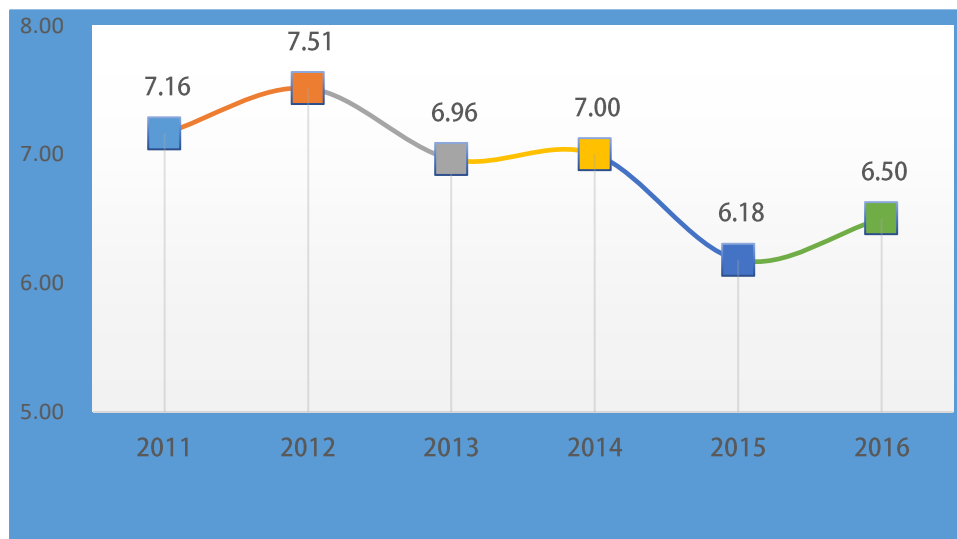




dan jasa disuatu daerah atau wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi ini bahkan dirasa lebih penting oleh banyak kalangan karena lebih dikenal dan lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar pada tahun 2016 mencapai 6,50 persen. Angka ini relatif lebih tinggi dari angka Provinsi Bali yang mencapai 6,24 persen. Selama tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tumbuh positif. Pertumbuhan dari tahun 2012-2016, berfluktuasi. Terlihat dari tahun 2012 sebesar 7,51 persen menjadi sebesar 6,96 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar tumbuh menjadi 7,00 persen dan selanjutnya pada tahun 2015 kembali melambat menjadi 6,21 persen. Sedangkan pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi kembali mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 6,50 persen, sehingga dari sisi target rencana pembangunan dan penyerapan anggaran sudah memenuhi target sesuai rencana.

Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 1.2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar,
2011-2016 (Persen)





Jika dilihat rata-rata pertumbuhan selama tahun 2012-2016, lapangan usaha yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi yaitu sebesar 9,95 persen. Lapangan usaha informasi dan komunikasi selain memiliki laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2016 juga memiliki rata - rata pertumbuhan yang tinggi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang kedua diduduki oleh jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,11 persen dan diikuti oleh pengadaan listrik dan gas sebesar 8,73 persen. Selanjutnya administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial sebesar 8,40 persen. Sedangkan untuk penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai kategori yang menopang industri pariwisata di Kota Denpasar memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 6,43 persen sedangkan lapangan usaha pertanian hanya memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,27 persen. Lapangan usaha pertanian terus mengalami perlambatan pertumbuhan setiap tahun dengan semakin besarnya alih fungsi lahan di Kota Denpasar.



Laju pertumbuhan riil PDRB Kota Denpasar menurut lapangan usaha pada tahun 2012 s.d 2016 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.4.
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Denpasar Menurut Lapangan Usaha, 2013-2016 (Persen)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015*	2016**	Rata-rata
1		3	4	5	6	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,43	8,54	-0,37	1,27	2,97
B	Pertambangan dan Penggalian	6,45	-0,84	-0,83	0,00	-24,80
C	Industri Pengolahan	7,29	8,06	3,48	3,16	5,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,22	2,09	-0,51	8,73	6,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,63	6,61	6,04	4,54	5,45
F	Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran	5,05	1,12	7,61	6,61	5,50
G	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,12	6,64	9,59	6,46	7,70
H	Transportasi dan Pergudangan	5,91	8,52	6,06	7,32	6,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,45	5,50	3,90	6,43	5,82
J	Informasi dan Komunikasi	4,85	6,45	8,72	9,95	9,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,90	8,96	7,22	7,95	9,01
L	Real Estat	6,03	8,27	9,44	6,45	7,55
M,N	Jasa Perusahaan	8,27	6,97	7,43	7,93	7,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,96	10,21	6,57	8,40	6,06



Lapangan Usaha		2013	2014	2015*	2016**	Rata-rata
1		3	4	5	6	
P	Jasa Pendidikan	12,77	10,08	8,07	8,21	9,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,81	11,86	12,67	9,11	11,36
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,24	7,18	9,38	5,54	6,43
Produk Domestik Regional Bruto		6,96	7,00	6,18	6,50	6,67

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2017

C. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok serta Struktur Organisasi

C.1. Kedudukan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kota Denpasar dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu:

a. Aspek Politik

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Denpasar dari aspek politik ditandai dengan program legislatif dalam membahas perubahan atas peraturan tentang struktur organisasi dan tata kerja dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah.





b. Aspek Administrasi/ Manajemen Pemerintah

Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik.

C.2. Kewenangan dan Tugas Pokok

a. Kewenangan

Kota Denpasar sebagai daerah otonomi, kewenangannya mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang meliputi kebijakan perencanaan nasional, pengendalian secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis serta konservasi dan standarisasi nasional. Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebanyak 26 (dua puluh enam) urusan wajib untuk menyelenggarakan pelayanan dasar pemerintahan dan 9 (sembilan) urusan pilihan untuk menyelenggarakan pengembangan sektor unggulan.

Di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, rincian urusan tersebut, diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Denpasar, dengan urusan wajib yang dilaksanakan terdiri dari :





- 1). Pendidikan ;
- 2). Kesehatan ;
- 3). Lingkungan Hidup ;
- 4). Pekerjaan Umum ;
- 5). Penataan Ruang ;
- 6). Perencanaan Pembangunan ;
- 7). Perumahan ;
- 8). Kepemudaan dan Olah Raga ;
- 9). Penanaman Modal ;
- 10). Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;
- 11). Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- 12). Ketenagakerjaan ;
- 13). Ketahanan Pangan ;
- 14). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- 15). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
- 16). Perhubungan ;
- 17). Komunikasi dan Informatika ;
- 18). Pertanahan ;
- 19). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- 20). Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian ;
- 21). Pemberdayaan Masyarakat ;
- 22). Sosial ;
- 23). Kebudayaan ;
- 24). Statistik ;
- 25). Kearsipan ; dan
- 26). Perpustakaan

sedangkan urusan pilihan terdiri dari :

- 1). Kelautan dan Perikanan ;
- 2). Pertanian ;
- 3). Kehutanan ;
- 4). Energi dan Sumber Daya Mineral ;
- 5). Pariwisata ;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2017





- 6). Industri ;
- 7). Perdagangan ; dan
- 8). Ketramigrasian ;
- 9). Pasedahan Agung ;

b. Tugas Pokok

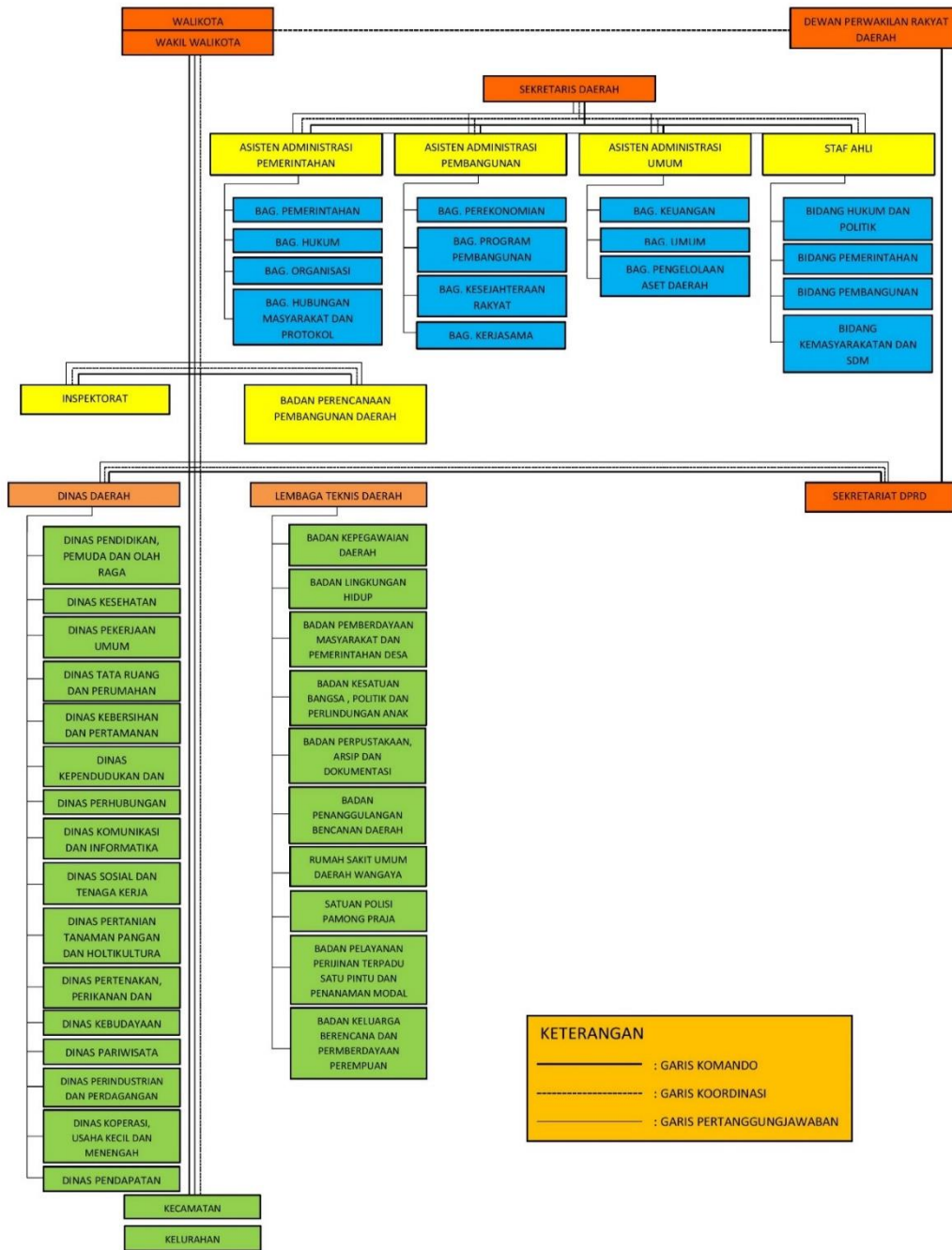
Pemerintah Kota Denpasar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan menuju Keharmonisan.

C.3. Struktur Organisasi

Kota Denpasar sebagai salah satu Kota di Provinsi Bali, secara yuridis formal didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Denpasar dapat disajikan pada Gambar berikut :





Gambar 1.3.
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Denpasar





D. Aparatur Pemerintah

Keadaan Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2017 sejumlah 5.996 orang, yang terdiri dari :

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan :

Golongan I	: 145 orang
Golongan II	: 1.183 orang
Golongan III	: 2.540 orang
Golongan IV	: 2.128 orang

b. Jabatan Struktural yang terdiri dari :

Esselon II	: 36 orang
Esselon III	: 178 orang
Esselon IV	: 621 orang
Esselon V	: 3 orang

c. Jabatan fungsional yang terisi sebanyak 5.158 orang, terdiri atas :

- 1) Fungsional guru sebanyak 2.275 orang
- 2) Fungsional Medis dan Paramedis sebanyak 606 orang
- 3) Fungsional tertentu sebanyak 160 orang
- 4) Staf dan Tata Usaha sebanyak 2.117 orang

d. Tingkat Pendidikan :

SD	: 120 orang
SMP	: 151 orang
SLTA	: 1.386 orang
D1	: 53 orang
D2	: 574 orang
D3	: 459 orang
S1/D4	: 2.838 orang
S2	: 413 orang
S3	: 2 orang





Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan berbagai program melalui memberikan penghargaan, pendidikan pelatihan teknis umum dan fungsional serta pemberian hukuman dan pembinaan.

a. Pemberian penghargaan

- 1) Satyalancana dengan masa kerja 10, 20 tahun dan 30 tahun sejumlah 200 orang, yang terdiri dari :
 - Satyalancana Karya Satya XXX Tahun 16 orang
 - Satyalancana Karya Satya XX Tahun 80 orang;
 - Satyalancana Karya Satya X Tahun 326 orang.

b. Pendidikan Pelatihan yang meliputi :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 243 orang
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 53 orang, terdiri dari :
 - Diklatpim II : 53 orang
 - Diklatpim III : - orang
 - Diklatpim IV : 30 orang
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional melalui pengiriman pada lembaga pendidikan dan pelatihan sebanyak 245 orang, dengan rincian :
 - Pendidikan dan pelatihan teknis : 28 orang
 - Pendidikan dan pelatihan fungsional : -5 orang

c. Pemberian Hukuman

Pelanggaran Disiplin Pegawai sebanyak 7 orang yang terdiri dari Pelanggaran disiplin pegawai tingkat ringan 0 orang, tingkat sedang 3 orang, pelanggaran disiplin tingkat berat 4 orang.

d. Pada Tahun 2017 Pemerintah Kota Denpasar tidak melaksanakan pengadaan CPNS.





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis daerah untuk periode 5 (lima) tahun, menjabarkan Visi dan Misi, Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD. RPJMD berupaya menyelesaikan isu-isu dan permasalahan yang terjadi di daerah melalui strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1. Visi

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah :

**“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA
DALAM KESEIMBANGAN MENUJU
KEHARMONISAN”**

Denpasar kreatif adalah "Denpasar Kota Hidup". Kota hidup adalah kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2017





inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. Inilah Denpasar Berwawasan Budaya.

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman.

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016- 2021 yang menekankan wawasan budaya sesuai dengan Visi RPJPD Kota Denpasar hingga tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 2009 yaitu: **“Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana”**. Kota Budaya yang dimaksudkan dalam RPJPD adalah budaya yang bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsafah Tri Hita Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang





terlalu banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan dan falsafah *Tri Hita Karana* yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya.

2. Misi

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 – 2021, sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD Semesta Berencana periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi *Tri Hita Karana*. Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana periode Tahun 2016-2021 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 disusun misi antara lain:

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.





5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Kota Denpasar 2016-2021 ditetapkan 5 (lima) tujuan, yaitu sebagai berikut :

a. Tujuan 1:

Menguatkan jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.

Sasaran :

- 1) Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional ;

Indikator Kinerja :

- Luas Areal Subak yang dapat dipertahan (Hektar)
- Indeks Tri Hita Karana (Indeks)

- 2) Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya.

Indikator Kinerja :

- Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indeks).

b. Tujuan 2 :

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur

Sasaran :

- 3) Mengentaskan Kemiskinan

Indikator Kinerja:

- Angka Kemiskinan (%).





4) Mengurangi Pengangguran

Indikator Kinerja:

- Angka Pengangguran (%).

5) Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat

Indikator Kinerja:

- Angka Harapan Hidup (Tahun)

6) Meningkatkan kualitas Pendidikan Masyarakat

Indikator Kinerja:

- Indeks Pendidikan (Indeks)

7) Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja :

- Indeks Pembangunan Gender (Indeks)
- Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)
- Kategori Kota Layak Anak (Kategori)

8) Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan

Indikator Kinerja :

- Luas Permukiman Kumuh (%)

9) Meningkatnya kualitas Infrastruktur

Indikator Kinerja :

- Jalan Kondisi Baik (%)
- Titik Genangan (%)
- Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi (%)
- Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi (%).





c. Tujuan 3 :

Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Sasaran :

- 10) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel

Indikator Kinerja:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)
- Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori)
- Predikat Sistem Akuntansi Kinerja Pemerintah (Kategori)

d. Tujuan 4:

Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan

Sasaran:

- 11) Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan

Indikator Kinerja:

- Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB (%)
- Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB (%)

- 12) Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa

Indikator Kinerja:

- Lembaga Perkreditan Desa Sehat (%).

- 13) Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil

Indikator Kinerja:

- Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil (%).
- Koperasi yang SHU-nya meningkat (%).





14) Meningkatnya Nilai Investasi

Indikator Kinerja:

- Peningkatan Nilai Investasi yang Tercatat di PTSP (%).

15) Meningkatnya Pariwisata berbasis budaya

Indikator Kinerja:

- Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)
- Lama Tinggal Wisatawan
 - Asing
 - Domestik
- Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan (dalam jutaan rupiah)

e. Tujuan 5:

Menguatkan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa

Sasaran:

16) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator:

- Sampah Tereduksi (%)
- Indek Lingkungan Hidup (Indeks).

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota No. 18A.Tahun 2015 dan telah direvisi dengan Peraturan Walikota Denpasar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2017





Nomor 16 Tahun 2018 dan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017. Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	
1	2	3		4	
1	Menguatkan jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	1	Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan (ha)
				2	Indeks Tri Hita Karana
		2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	3	Indeks Pembangunan Kebudayaan
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan	3	Mengentaskan Kemiskinan	4	Angka Kemiskinan
		4	Mengurangi Pengangguran	5	Angka Pengangguran (%)
		5	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup (Tahun)
		6	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	7	Indeks Pendidikan





No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	
1	2	3		4	
	pembangunan infrastruktur	7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	8	Indek Pembangunan Gender/IPG
				9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG
				10	Katagori Kota Layak Anak
		8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	11	Luas permukiman kumuh (%).
		9	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	12	Jalan Kondisi Baik (%).
				13	Titik Genangan (%)
				14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi (%)
15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi (%)				
3	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	16	Indeks Kepuasan Masyarakat
				17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan





No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	
1	2	3		4	
					Daerah (Kategori).
				18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kategori).
4	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan	11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB (%)
				20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB (%)
		12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat (%).
		13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil (%).
				23	Koperasi yang SHU-nya meningkat (%).





No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	
1	2	3		4	
		14	Meningkatnya nilai investasi	24	Investasi yg tercatat di PTSP
		15	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	25	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)
				26	Lama Tinggal Wisatawan - Asing - Domestik
				27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan (dalam jutaan rupiah)
5	Menguatkan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa	16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	28	Sampah tereduksi (%)
				29	Indeks LH





B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen Kepala Daerah yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kota Denpasar 2016-2021, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.125.624.329.241,86 (49,36 persen dari total Belanja pada APBD Kota Denpasar TA 2017 / sebesar Rp.2.280.383.206.906,85).





Tabel 2.2.

Tujuan, Sasaran dan Anggaran Kinerja Pemerintah Kota Denpasar
Tahun 2017

No	Tujuan/Sasaran	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Menguatnya jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	50.140.564.111,00
2	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur	586.650.201.613,91
3	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan penegakan supremasi hukum (<i>low enforcement</i>)	563.720.830.950,95
4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (<i>Welfare Society</i>) yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan	87.500.535.003,00
5	Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa	164.826.400,00

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2017



Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017 sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan	Hektar	2.413
Indeks Tri Hita Karana	Indeks	79,81

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A

Sasaran Strategis 3 Mengentaskan Kemiskinan		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Angka Kemiskinan	Persen	2,12

Sasaran Strategis 4 Mengurangi Pengangguran		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Angka Pengangguran	%	3,45

Sasaran Strategis 5 Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Angka Harapan Hidup	Tahun	74,16

Sasaran Strategis 6		
---------------------	--	--

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Indeks Pendidikan	Indek	N/A

Sasaran Strategis 7 Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	78,00
Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	60,00
Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Nindya

Sasaran Strategis 8 Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Luas Permukiman Kumuh	Persen	1,65

Sasaran Strategis 9 Meningkatnya kualitas Infrastruktur		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Jalan Kondisi Baik	Persen	60,66
Titik Genangan	Persen	10%
Rumah Tangga Terakses Sistem Jaringan Sanitasi	Persen	44,76
Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi	Persen	47,64

Sasaran Strategis 10 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,50
Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	WTP
Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B

Sasaran Strategis 11

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2017

Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persen	3
Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	Persen	6

Sasaran Strategis 12 Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Lembaga Perkreditan Desa Sehat	Persen	100

Sasaran Strategis 13 Meningkatkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil	Persen	0,50
Koperasi yang SHU-nya meningkat	Persen	60,00

Sasaran Strategis 14 Meningkatnya Nilai Investasi		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Investasi yang tercatat di PTSP	Persen	2,5

Sasaran Strategis 15 Meningkatnya Pariwisata berbasis budaya		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	548.813
Lama Tinggal Wisatawan		
- Asing	Hari	3,12
- Domestik	Hari	3,00
Jumlah Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan	Juta rupiah	287.571,14

Sasaran Strategis 16



Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2017
Sampah tereduksi	Persen	22
Indek LH	Indeks	N/A

- Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 sebesar Rp 2.280.383.206.906,85



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

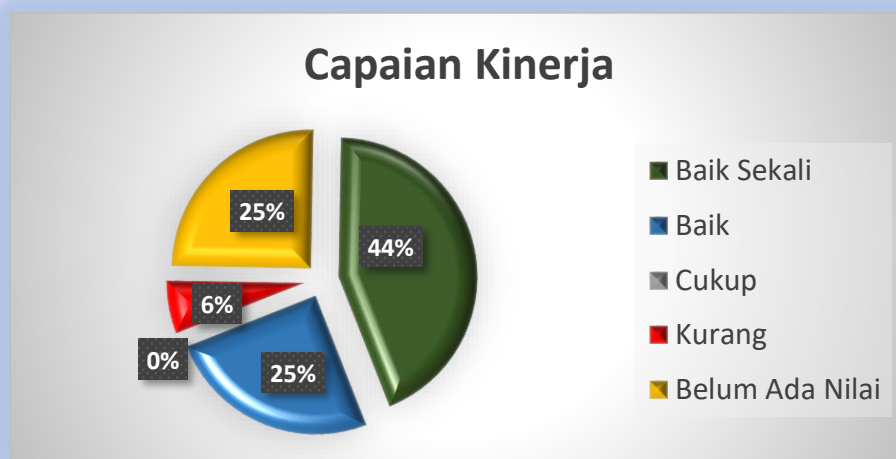
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar dilakukan dengan cara membandingkan antar target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar sebesar 105,87% yang dihitung berdasarkan persentase rata rata capaian sasaran.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Katagori Capaian
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd 100%	Baik (B)
3	55% sd 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal seperti diatas



Gambar 3.1.
Grafik Capaian Kinerja



Dari 16 sasaran yang telah ditetapkan, sebanyak 7 sasaran dinyatakan “Baik Sekali”, 4 sasaran dinyatakan “Baik”, 1 sasaran dinyatakan “Kurang” dan 4 sasaran belum ada nilai mengingat Badan Pusat Statistik sampai dengan saat ini belum mengeluarkan data-data terbaru dan survey internal belum dilakukan.

B. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Tujuan 1. Menguatnya Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kebudayaan Bali

Untuk mewujudkan Tujuan Menguatkan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kebudayaan Bali, dalam tahun 2017 ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional.
- b. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya.

Sebagaimana Visi Kota Denpasar “Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan” yang telah ditetapkan, Denpasar harmonis dapat terwujud apabila masyarakat Kota Denpasar memegang teguh budaya dalam melaksanakan perkehidupannya. Budaya merupakan kekuatan Kota Denpasar, kekuatan ini sebagai faktor pembeda yang akan meningkatkan daya saing Kota Denpasar di tatanan global. Berkaitan dengan hal tersebut, budaya sebagai jatidiri masyarakat





Kota Denpasar berupaya terus dimantapkan keberadaannya sehingga di era global ini budaya di Kota Denpasar tetap eksis keberadaannya dan bahkan berkembang tanpa tercabut dari akarnya.

Capaian masing masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran Menguatnya Keberadaan Lembaga-Lembaga Tradisional.

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1

Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
			Target	Realisasi	
1 Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan	Hektar	2.444	2.413	2.409	99,83
2 Indeks Tri Hita Karana	Indeks	79,71	79,81	80,74	101,17
Rata-rata Capaian Kinerja					100,50

Dari Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional yang terdiri dari 2 indikator sasaran, ke-2 indikator tersebut telah mencapai target. Indikator sasaran Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan sebesar 99,83% dan indikator sasaran Indeks Tri Hita Karana sebesar 101,17%. Rata-rata capaian kinerja sebesar 100,50% (Baik Sekali).

Lembaga kemasyarakatan pada masyarakat Bali bersifat tradisional, yang telah ada sejak dahulu dan keberadaannya masih eksis hingga saat ini. Lembaga tradisional tersebut antara lain Desa Pekraman, Banjar, Subak dan Sekeha.

Subak merupakan lembaga tradisional yang bergerak di bidang pertanian dikenal sebagai organisasi agraris religius yang ada di Bali sejak dahulu. Subak sebagai lembaga yang





berperan di bidang pertanian dalam arti yang seluas-luasnya mulai dari proses pengolahan lahan, pembibitan, pola dan tata cara tanam, pemeliharaan sampai kepada pengolahan serta pemasaran hasil-hasilnya. Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi dinyatakan bahwa Subak adalah masyarakat hukum adat Bali yang bersifat sasio agraris religius yang secara historis didirikan sejak dahulu kala dan berkembang terus sebagai organisasi penguasa tanah dalam bidang pengaturan air dan lain-lain untuk persawahan dari berbagai sumber air di dalam suatu daerah. Subak dapat eksis apabila tetap memiliki lahan pertanian, berkaitan dengan hal ini upaya yang dilakukan adalah berupaya tetap mempertahankan lahan pertanian di Kota Denpasar atau meminimalisasi terjadinya alih fungsi lahan.

Desa pakraman merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan khayangan tiga atau khayangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu unsur penting terbentuknya masyarakat hukum adat adalah adanya kelompok masyarakat yang bertindak sebagai satu kesatuan ke dalam maupun ke luar. Kelompok masyarakat atau kelompok orang dalam desa pakraman inilah yang disebut unsur pawongan. Kelompok orang yang merupakan satu kesatuan dalam wadah desa pakraman inilah yang lazim disebut krama desa.

Philosophy Tri Hita Karana menekankan pada konsep keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan (parahyangan), manusia dengan manusia (pawongan) dan





manusia dengan alam (palemahan). Tri Hita Karana tersebut yang sampai saat ini masih eksis keberadaannya tidak dapat terlepas dari Desa Adat atau yang juga disebut dengan Desa Pakraman sebagai struktur kesatuan masyarakat hukum Adat Bali yang memiliki fungsi untuk menjaga nilai-nilai budaya yang tidak terlepas dari konsep Tri Hita Karana tersebut. Peran Desa Pakraman yang tidak hanya untuk menjaga persoalan keagamaan dalam menjaga keseimbangan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan dan masyarakat tetapi tidak kalah pentingnya juga menjaga keharmonisan alam lingkungan di wilayahnya yang dilakukan dengan cara duniawi dan akhirat (sekala dan niskala) dilakukan oleh warga Desa Pakraman. Terlihat bahwa krama desa pakraman memegang peran penting dalam menjaga tetap eksisnya desa pakraman.

Pada Tahun 2017 terjadi alih fungsi lahan seluas 35 hektar, semula pada tahun 2016 luas sawah di Kota Denpasar 2.444 ha dan berkurang menjadi 2.409 hektar di tahun 2017. Alih fungsi lahan ini terjadi di Subak Paang seluas 2 hektar, Subak Taman seluas 1 hektar, Subak Temaga seluas 1 ha, Subak Padang Galak seluas 2 hektar, Subak Sidakarya 2 hektar, Subak Kepaon 2 hektar, Subak Tegallantang 4 hektar, Subak Lange 2 hektar, Subak Dalem 4 hektar, Subak Lungatad 3 hektar, Subak Kedua 2 hektar, Subak Pakel 2 hektar, Subak Petangan 5 hektar, Subak Praupan Timur seluas 2 hektar dan Subak Praupan Barat seluas 5 hektar. Bila dirinci per Wilayah Kecamatan, maka pengurangan luas areal subak pada Kecamatan Denpasar Utara seluas 11 hektar, Kecamatan Denpasar Timur seluas 5 hektar, Kecamatan Denpasar Selatan seluas 16 Hektar, dan Kecamatan Denpasar seluas 3 hektar.





Rendahnya nilai tambah sektor pertanian dibanding dengan sektor lapangan usaha lain menjadi kendala dalam mempertahankan areal subak ini dan didukung juga dengan rendahnya luasan kepemilikan lahan pertanian di Kota Denpasar. Namun upaya untuk mempertahankan lahan pertanian tetap dilakukan antara lain melalui pemberian insentif kepada petani berupa pembebasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada areal sawah yang berada dalam Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 0%, disamping peningkatan kapasitas subak baik berupa manajemen, komoditi pertanian maupun pembenahan infrastruktur irigasi.

Krama sebagai penggerak desa pakraman memegang peran penting dalam melestarikan desa pakraman yang ada. Globalisasi dan modernisasi menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mempertahankan nilai nilai budaya. Partisipasi krama dalam mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan desa pakraman yang berkaitan erat dengan aktifitas budaya menjadi tolok ukur keberlanjutan desa pakraman kedepan. Capaian akuntabilitas dengan mengukur tingkat partisipasi krama dalam melaksanakan Tri Hita Karana penilaiannya belum dapat ditampilkan, mengingat survey partisipasi ini baru dapat dilaksanakan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2017.

Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pecalang berasal dari kata "calang" dan menurut theologinya diambil dari kata "celang" yang dapat diartikan waspada. Dari sini dapat artikan secara bebas, "Pecalang" adalah seseorang yang ditugaskan untuk mengawasi keamanan desaadatnya. Dapat diibaratkan bahwa pecalang





sebagai petugas keamanan desa adat. Pecalang telah terbukti ampuh mengamankan jalannya upacara-upacara yang berlangsung di desa adatnya, bahkan secara luas mampu mengamankan kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan khalayak ramai. Pemerintah Kota Denpasar melakukan pembinaan yang berkelanjutan terhadap pecalang baik secara langsung maupun melewati Desa Pekramannya, sehingga diharapkan Pecalang lebih berperan lagi dalam mengamankan ketentraman dan ketertiban masyarakat di lingkungan wilayah adatnya. Akumulasi peran pecalang di masing masing desa pekraman diharapkan mampu menurunkan konflik social yang terjadi di Kota Denpasar.

2) Sasaran Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya

Pembangunan bidang kebudayaan diupayakan dengan pembinaan secara berjenjang, baik melalui banjar maupun lembaga dan organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan dengan memberi ruang untuk mengikuti pesta kesenian, baik tingkat kota maupun provinsi sehingga kreatifitas seni dan budaya dapat tumbuh dan berkembang dan menjadi salah satu kekuatan pariwisata di Kota Denpasar.





Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
			Target	Realisasi	
1 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A
Rata-rata Capaian Kinerja					N/A

Indikator sasaran Indek Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2017 belum dapat dihitung, namun usaha-usaha untuk melestarikan dan mengembangkan budaya dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan even budaya.

Sekaa yang ikut terlibat dalam festival budaya daerah pada tahun 2017 ditargetkan 100 sekaa ternyata antusias sekaa yang tinggi dan yang ikut dalam festival menjadi berjumlah 117 sekaa sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 117%. Capaian ini disebabkan pembinaan yang terus menerus dilakukan dan memberikan ruang yang lebih, baik kepada sekaa, sanggar maupun sekolah untuk ikut serta dalam berbagai even kesenian yang dilaksanakan di Kota Denpasar, seperti:

- o Pesta Kesenian Bali.
- o Parade Gong Kebyar dan Kesenian Klasik.
- o Festival ogoh-ogoh.
- o Pementasan rutin sanggar setiap hari sabtu dan minggu di lapangan Puputan Badung.
- o Pementasan wayang kulit pada setiap Rahina Purnama dan Tilem dan hari-hari tertentu di Pura Jagatnatha.
- o Pelaksanaan pementasan Maha Bandana Prasadha yang dilandasi dengan spirit Puputan Badung.





- Pelaksanaan Denpasar Festival dan melepas matahari sebagai puncak kesenian di Kota Denpasar setiap akhir tahun.
- Kaderisasi Pelestarian Budaya.
- Misi Kesenian ke Luar Daerah.
- Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita tingkat Kota Denpasar dan Tingkat Provinsi Bali.
- Pelatihan untuk anak sekolah saat liburan.

Jumlah sanggar yang ikut terlibat dalam pentas budaya berjumlah 44 sanggar sesuai dengan besaran target yang ditetapkan pada tahun 2017, sehingga pencapaian kinerjanya mencapai 100%.

Ogoh-ogoh adalah patung yang berukuran besar yang terbuat dari bubur kertas dan bahan pelekak yang biasanya dibuat oleh kaum remaja Bali sebagai suatu bagian dari perayaan tahunan “upacara pembersihan” (ngerupakan), yang dilaksanakan sehari sebelum perayaan Nyepi. Semua Sekaa Teruna Teruni (organisasi pemuda di tingkat banjar) yang ada di Denpasar terlibat aktif dalam keikutsertaan parade ogoh ogoh ini sehingga dapat dikatakan pencapaian kinerjanya 100%. Pembinaan kepada STT salah satunya melalui lomba ogoh ogoh berupaya terus dilakukan, agar kreatifitas, gotong royong, seni gamelan, seni tari dan seni anyaman dapat terus dijaga bahkan dikembangkan sebagai salah satu aset budaya.





Tujuan 2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur

Tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur berkaitan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur pada tahun 2017 ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Mengentaskan Kemiskinan.
- b. Mengurangi Pengangguran
- c. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.
- d. Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan.
- e. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur.
- f. Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil.

3) Sasaran Mengentaskan Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi





Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Mengentaskan Kemiskinan

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
			Target	Realisasi	
1 Angka Kemiskinan	Persen	2,15	2,12	2,27	93,39
Rata-rata Capaian Kinerja					93,39

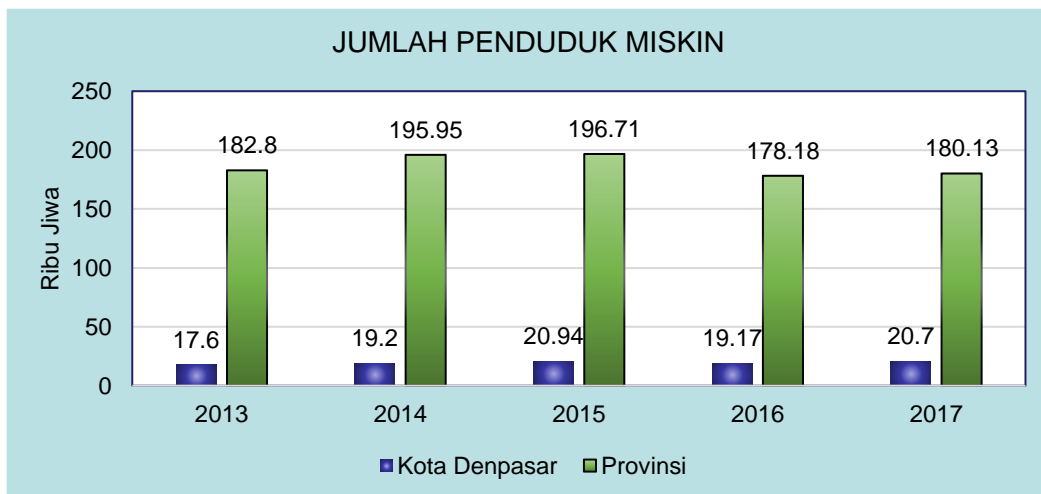
Dari Tabel 3.4. diatas dapat diketahui bahwa Sasaran Strategis Mengentaskan Kemiskinan dengan indikator sasaran Angka Kemiskinan ditargetkan sebesar 2,12% terealisasi sebesar 2,27% atau sebesar 93,39 (Baik).

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kota Denpasar sejak tahun 2011 s/d 2017 mengalami fluktuasi, tahun 2011 jumlah penduduk miskin sebanyak 14,5 ribu jiwa mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 12,7 ribu jiwa, sedangkan mulai tahun 2013 s/d 2015 mengalami peningkatan. Tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebanyak 17,6 ribu jiwa, sampai tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 20,94 ribu jiwa. Tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi sejumlah 19,17 ribu jiwa namun pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 20,70 ribu jiwa. Selengkapnya disajikan pada Gambar 3.2. dan Gambar 3.3. Penyebabnya antara lain Jumlah pendatang yang cukup tinggi. Tidak semua pendatang memiliki keterampilan yang memadai untuk bertahan hidup di Kota Denpasar. Akibatnya, banyaknya pendatang justru membawa pada masalah pengangguran yang akhirnya berdampak pada kemiskinan penduduk di Kota

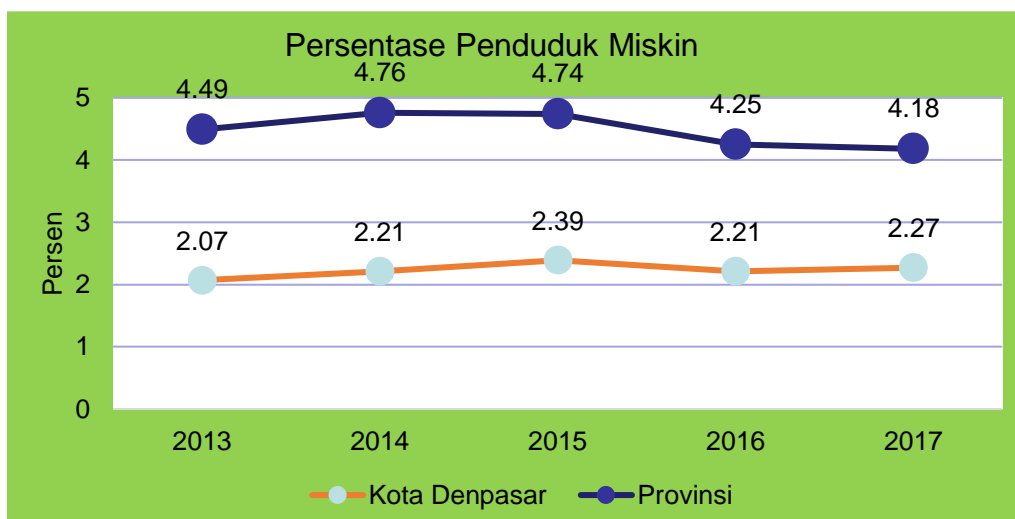




Denpasar. Selain itu tingkat Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) yang sangat kecil ($P1=0,12$ & $P2=0,03$ pada tahun 2017) sehingga pergeseran garis kemiskinan dari Rp.483.821,00 (th 2016) menjadi Rp.512.94,00 (tahun 2017) berdampak pada besarnya pertambahan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Denpasar.



Gambar 3.2.
Jumlah Penduduk Miskin di Kota Denpasar Tahun 2013-2017



Gambar 3.3..
Persentase Penduduk Miskin Kota Denpasar Tahun 2013-2017





4) Sasaran Mengurangi Pengangguran

Secara umum pengangguran diartikan sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang dalam mencari kerja atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pemecatan dan berusaha untuk memperoleh pekerjaan.

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4

Mengurangi Pengangguran

Indikator Sasaran	Satuan	Keadaan Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
			Target	Realisasi	
1 Angka Pengangguran	Persen	3,54	3,45	N/A	N/A
Rata-rata Capaian Kinerja					

Capaian Sasaran Strategis Mengurangi Pengangguran dengan Indikator Sasaran Angka Pengangguran pada tahun 2017 belum ada nilai realisasi target mengingat BPS belum mengeluarkan data untuk pengangguran tahun 2017.

Solusi :

- Menunggu rilis data dari BPS
- Merencanakan formulasi pengukuran yang baru
- Menentukan indikator sasaran yang measurable / dapat diukur oleh instansi terkait.





Dalam usaha untuk mengurangi/menekan jumlah pengangguran di Kota Denpasar telah diselenggarakan JOB FAIR dengan harapan agar tenaga kerja yang ada di Kota Denpasar dapat terserap ke dunia kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing pencari kerja. Penyelenggaraan Job Fair pada tahun 2017 antara lain di selenggarakan pada tanggal 21-22 April 2017 bertempat di Hotel Inna Jalan Veteran Denpasar. Pelaksanaan Job Fair ini merupakan kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA **PEMERINTAH KOTA DENPASAR**

Ayo Kunjungi !!

JOB FAIR

21 - 22 April 2017

*Pukul 09.00 - 16.00 Hotel Inna Bali
Jl. Veteran No.3 Denpasar*

Diikuti 40 Perusahaan **Tersedia 1001 Lowongan Kerja**

Datang dan Bawa Langsung Surat Lamaran Anda
Membuka Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja

Info lebih lanjut hubungi :
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
Jalan Gatot Subroto VI/J No.32 Denpasar, Telp. 0361-9075751
Website: <http://kemnaker.go.id>

Pendaftaran Pencari Kerja Secara Online di:
<http://e-bursakerja.kemnaker.go.id>

Gambar 3.4.
Pelaksanaan Job Fair di Kota Denpasar





Job Fair juga diselenggarakan di Area Parkir Utara Lapangan Lumintang Denpasar Utara pada tanggal 13-16 Juni 2017 dengan melibatkan 30 perusahaan. Job Fair ini hanya untuk warga Denpasar saja, namun kesempatan ini untuk umum dan tidak dipungut biaya. Pelaksanaan Kegiatan Job Fair ini diadakan pada bulan Juni bertujuan untuk membantu pelajar SMA/SMK yang baru lulus agar segera bisa mendapatkan pekerjaan.



Gambar 3.5.

Para pelamar kerja sedang melihat tawaran kerja yang disediakan oleh berbagai perusahaan di Stand Job Fair 2017, Area Parkir Utara Lapangan Lumintang, Denpasar





5) Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat Kesehatan Masyarakat merupakan gambaran kemampuan/ Kinerja petugas kesehatan untuk mencapai indikator Kesehatan, kemampuan Perangkat Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan program/ kegiatan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana lazimnya untuk menggambarkan derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dan lain-lain.

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
				Target	Realisasi	
1	Angka Harapan Hidup	Indeks	74,04	74,16	N/A	N/A
Rata-rata Capaian Kinerja						

Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Sasaran Angka Harapan Hidup pada tahun 2017 belum mencapai target karena BPS belum mengeluarkan data untuk pengangguran tahun 2017.

Solusi :

- Menunggu rilis data dari BPS
- Merencanakan formulasi pengukuran yang baru
- Menentukan indikator sasaran yang measurable / dapat diukur oleh instansi terkait.



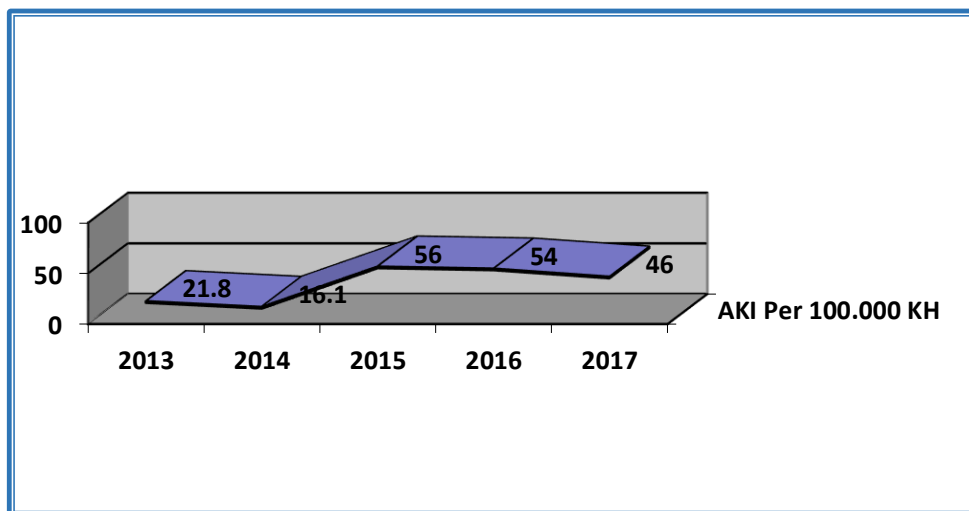


a. Angka Harapan Hidup Saat Lahir - AHH

Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Angka Harapan Hidup saat lahir di Kota Denpasar pada tahun 2016 mencapai 74,04 Tahun. Pada tahun 2017 di targetkan sebesar 74,16 tahun. Realisasinya sampai dengan saat penyusunan laporan ini belum didapatkan angkanya (belum dirilis oleh BPS).

b. Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, dan pelayanan kesehatan waktu melahirkan.



Gambar 3.6.
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Denpasar
Tahun 2013 – 2017





Pada grafik diatas terlihat dalam tiga tahun terakhir angka kematian ibu di Kota Denpasar cenderung berfluktuasi cukup besar. Pada tahun 2013 dan 2014 AKI di Kota Denpasar sudah dapat ditekan namun meningkat kembali secara signifikan pada tahun 2015 dan 2016 sedangkan tahun 2017 kembali sudah bisa ditekan.

Angka Kematian Ibu Maternal di Kota Denpasar tahun 2017 (46 per 100.000 KH) sudah lebih rendah dari target Rentsra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2017 (90 per 100.000 KH). Jika dibandingkan dengan target Nasional (125 per 100.000 KH) maupun target tingkat Propinsi Bali (100 per 100.000 KH), maka AKI per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Denpasar berada jauh di bawah target yang telah ditetapkan, demikian pula jika dibandingkan dengan AKI provinsi Bali tahun 2017 sebesar 62,69/100.000 KH.

Selama tahun 2017 di Kota Denpasar terjadi 8 kematian ibu yang terdiri dari 4 kematian ibu hamil dan dan 4 orang ibu nifas. Penyebab kematian ibu di Kota Denpasar adalah 1 orang karena perdarahan, 3 orang karena kelainan jantung dan 4 orang karena sebab lainnya. Upaya yang sudah dilakukan selain rutin melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian. Kegiatan lain juga sudah dilaksanakan pembelajaran kasus yang mengakibatkan kematian ibu tersebut.

Strategi kedepannya yang akan diambil untuk mengatasi tingginya angka kematian ibu adalah dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program agar ikut bersama-sama memantau ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu pada masa setelah melahirkan (Nifas) dengan gerakan sayang ibu.

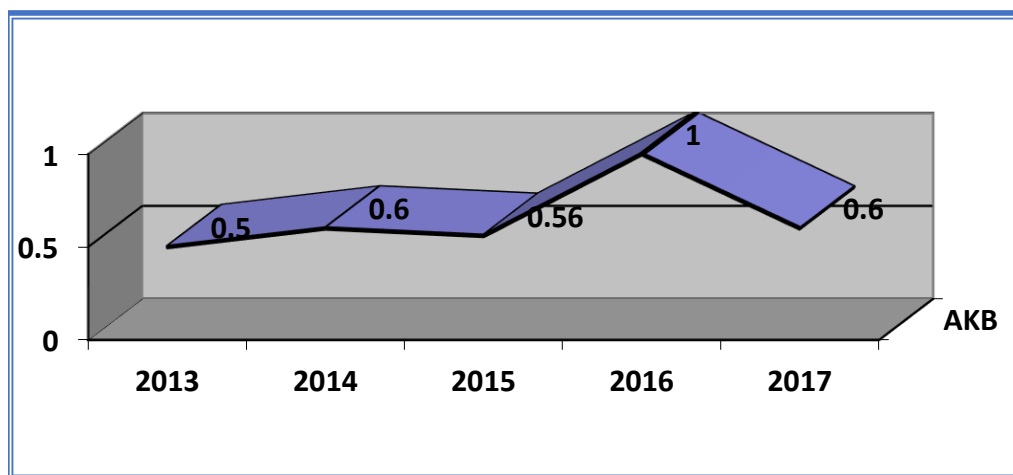




c. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Jumlah kematian penduduk yang berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu disuatu daerah. AKB merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat. AKB merupakan salah satu indikator yang sensitive terhadap ketersediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan perinatal. AKB juga mempunyai asosiasi dengan GNP (Gross National Product) perkapita : pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir dapat juga di gambarkan seperti pada grafik di bawah ini.



Gambar 3.7.

Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar Tahun 2013 – 2017





Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi, dan meningkat di tahun 2016 namun kembali dapat ditekan pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 terjadi 11 kematian bayi dari 17.333 lahir hidup. Penyebab kematian bayi ini adalah karena Berat badan bayi rendah (BBLR) 4 orang, asfeksia 1 orang, kelainan bawaan 4 dan karena sebab lainnya 2 orang. Lebih dari 90% kematian bayi di Kota Denpasar pada tahun 2016 terjadi pada usia kurang dari 28 hari dan 50% lebih kematian disebabkan oleh BBLR. Hal ini mengindikasikan kesehatan ibu pada saat hamil sangat berperan dalam perkembangan kesehatan janin.

Angka Kematian Bayi di Kota Denpasar untuk tahun 2017 sudah di bawah target yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar untuk tahun 2017 (15/1000KH). Bila kita bandingkan dengan realisasi tahun 2016 (1 per 1000 KH) maka angka kematian bayi tahun 2017 sudah mengalami penurunan. AKB Kota Denpasar masih dibawah AKB Provinsi Bali (4,78/1000 KH).

Kematian Bayi umumnya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil dan proses penanganan persalinan. Gangguan perinatal merupakan salah satu dari sekian faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ janin.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencegah kematian pada bayi meliputi imunisasi TT pada ibu hamil, persalinan yang bersih, perawatan mata, ASI dini dan eksklusif dan pemberian antibiotika untuk penyebab kematian karena infeksi. Dari segi promosi kesehatan, telah dilaksanakan

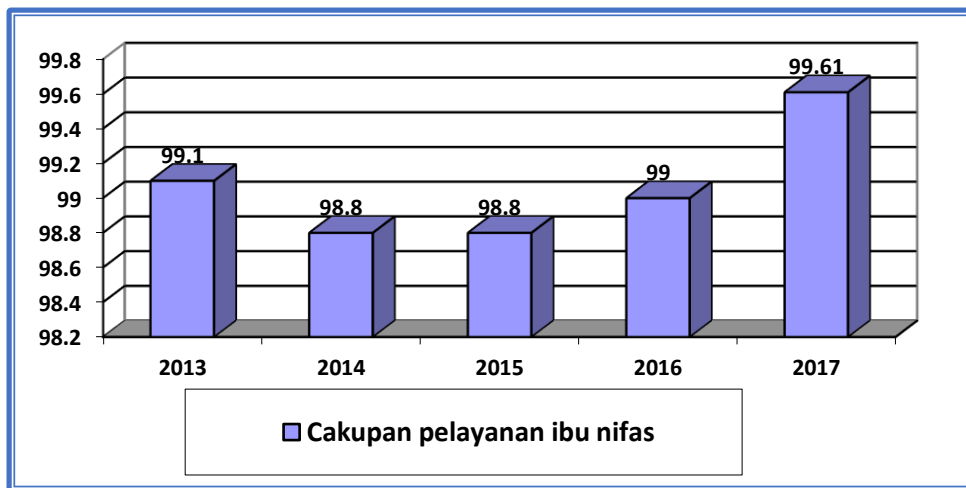




Penyuluhan kesehatan kepada remaja putri dan peningkatan pengetahuan kader.

d. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Pelayanan kunjungan nifas didefinisikan sebagai kontak ibu nifas dengan tenaga kesehatan baik di dalam gedung maupun di luar gedung fasilitas kesehatan (termasuk bidan di desa/ polindes/ poskesdes) dan kunjungan rumah. Pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi: 1) pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu; 2) pemeriksaan tinggi fundus uteri; 3) pemeriksaan lochia dan pengeluaran pervagina lainnya; 4) pemeriksaan payudara dan anjuran ASI Eksklusif 6 bulan; 5) pemberian kapsul vitamin A 200.000 IU sebanyak dua kali; dan 6) pelayanan KB pasca persalinan.



Gambar 3.8.

Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kota Denpasar Tahun 2013 sampai dengan 2017

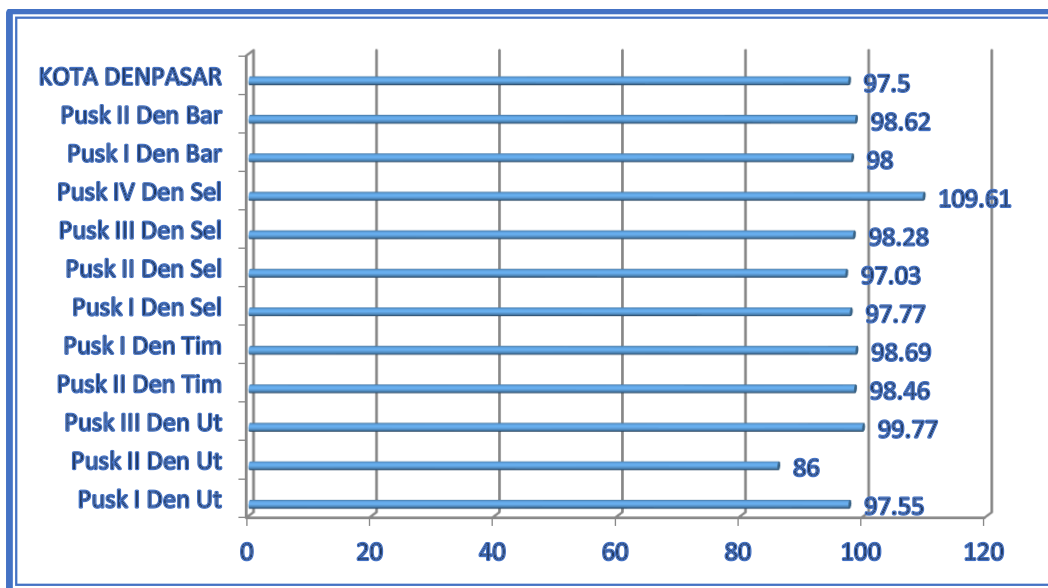




Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (cakupan Kf-3). Indikator ini menilai kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai standar.

Cakupan pelayanan ibu nifas pada tahun 2017 adalah sebesar 99.61% sedikit meningkat bila dibandingkan tahun 2016 (99.61%). Sementara target cakupan kunjungan ibu nifas berdasarkan target Renstra 2016-2021 adalah 98%. Jadi capaian pelayanan ibu nifas Kota Denpasar sudah melampaui target yang ditetapkan.

Salah satu pelayanan yang diberikan saat pelayanan ibu nifas adalah pemberian vitamin A. Persentase Ibu Nifas Yang Mendapatkan Kapsul Vitamin A selama tahun 2017 sebesar 99,62%.



Gambar 3.9.

Persentase Ibu Nifas Yang Mendapatkan Kapsul Vitamin A Menurut Puskesmas di Kota Denpasar Tahun 2017



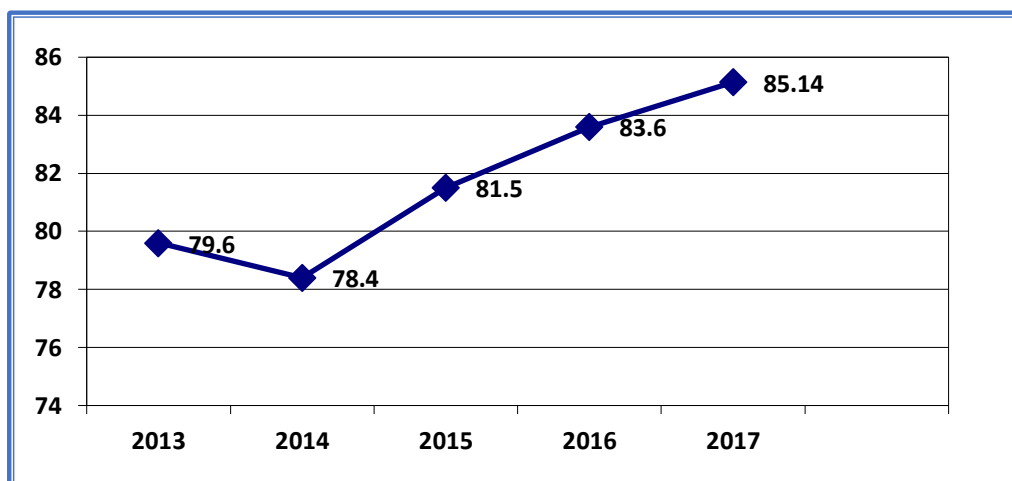


Pada tahun 2017 terdapat 15.365 Penduduk usia 60 tahun keatas di Kota Denpasar, dari jumlah tersebut 12.696 orang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (82,63%) capaian ini masih lebih rendah dari target (100%) namun kinerjanya sudah tergolong baik.

Cakupan gizi buruk mendapatkan perawatan: 100% balita yang menderita Gizi buruk sudah mendapatkan perawatan. Tahun 2017 ditemukan 5 orang balita gizi buruk dan semuanya sudah mendapatkan perawatan sesuai standar.

Tahun 2017 ditargetkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk sebanyak 8% realisasinya ditemukan sebesar 3,5% balita gizi kurang dan gizi buruk di Kota Denpasar.

Untuk menanggulangi rumah tangga yang rawan terhadap penyakit infeksi dan non infeksi, maka setiap rumah tangga yang ada perlu diberdayakan untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Gambaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada rumah tangga di Kota Denpasar dalam lima tahun terakhir seperti pada grafik di bawah ini :



Gambar 3.10.
Tren persentase Rumah Tangga ber-PHBS di Kota Denpasar
Tahun 2013 s/d 2017





Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir jumlah rumah tangga yang ber PHBS sudah cenderung mengalami peningkatan. Capaian ini sangat baik mengingat peran PHBS yang begitu penting dalam membantu menumbuhkan budaya hidup yang baik dibidang kesehatan. Target rumah tangga ber PHBS untuk tahun 2017 sebesar 80%. Pencapaian Kota Denpasar sebesar 85,14% hal ini menunjukkan pencapaian Rumah tangga ber PHBS di tahun 2017 sudah mencapai target yang ditetapkan. Untuk tahun selanjutnya perlu terus digalakkan upaya untuk meningkatkan cakupan rumah tangga ber-PHBS dengan meningkatkan pembinaan PHBS di rumah tangga dengan menggerakkan dan memberdayakan keluarga atau anggota rumah tangga untuk hidup bersih dan sehat melalui penyuluhan baik secara individu maupun berkelompok agar setiap orang, kelompok atau keluarga tahu, mau dan mampu menolong diri sendiri di bidang kesehatan.

Untuk mencapai rumah tangga ber PHBS terdapat 10 perilaku hidup bersih dan sehat yang dipantau, yaitu:

- Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
- Memberi ASI eksklusif
- Menimbang balita setiap bulan
- Menggunakan air bersih
- Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
- Menggunakan jamban sehat
- Memberantas jentik di rumah seminggu sekali
- Makan buah dan sayur setiap hari
- Melakukan aktifitas fisik setiap hari
- Tidak merokok di dalam rumah





6) Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Pendidikan menjadi faktor penting dalam sebuah pembangunan. Keberadaan SDM yang handal, akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas pula. Isu Strategis yang dihadapi Pemerintah Kota Denpasar pada Pendidikan antara lain :

1. Migrasi Penduduk sebagai konsekuensi daerah Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, maka Kota Denpasar mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang diikuti dengan penambahan kelompok umur usia sekolah (Umur 2 – 15 Tahun) yang wajib dan berhak memperoleh pendidikan.
2. Untuk menampung kelompok umur usia sekolah diperlukan ketersediaan sekolah (Ruang Kelas) yang memadai sesuai jenjang pendidikan berdasarkan kelompok umur.
3. Untuk kepastian kelompok usia sekolah dapat mengenyam pendidikan yang layak, maka dilakukan penambahan daya tampung baik melalui peningkatan kapasitas terpasang maupun pembangunan unit sekolah baru.
4. Untuk menampung kelompok umur usia sekolah diperlukan Sumber daya manusia yang memadai dari segi kompetensi, kualitas, maupun kuantitas.
5. Kurangnya sumber daya manusia baik dari segi kompetensi maupun kuantitas merupakan kendala dalam upaya menuju pelayanan prima kependudukan.





6. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan kepemudaan dan olahraga mutlak diperlukan guna mewujudkan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami mengenai pentingnya pendidikan kepemudaan dan olahraga diperlukan sosialisasi tentang ketentuan – ketentuan administrasi.
8. Penuntasan pengembangan tempat pelayanan pendidikan kepemudaan dan olahraga disetiap Kecamatan sebagai upaya pendekatan pelayanan kepada masyarakat.
9. Kebijakan pendidikan dari Pemerintah perlu direalisasikan melalui koordinasi dan dengan menerbitkan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota.

Untuk menangani isu strategis pada bidang Pendidikan, Pemerintah Kota Denpasar ditempuh dengan mengarahkan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses, pelayanan dan mutu pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin, dengan mengoptimalkan dukungan masyarakat (stakeholder) untuk memberikan peluang yang lebih besar terhadap akses masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi agar lulusannya memiliki keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja dengan menciptakan sistem pelayanan





- bidang pendidikan sesuai dengan tuntutan paradigma baru seperti revitalisasi, refungsionalisasi dan restrukturisasi terhadap sistem yang kurang responsif
3. Menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun termasuk pendidikan usia dini dan TK secara efisien, bermutu, dan relevan sebagai landasan yang kokoh bagi pengembangan kualitas manusia yang berlandaskan budaya Bali dan Agama Hindu.
 4. Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk buta aksara.
 5. Memperluas akses pendidikan non-formal bagi penduduk laki-laki maupun perempuan yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, buta aksara, putus sekolah dalam dan antar jenjang serta penduduk lainnya yang ingin meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dan menciptakan peluang peningkatan kualitas SDM melalui kerjasama bidang pendidikan.
 6. Meningkatkan daya saing SDM dengan menghasilkan lulusan yang mandiri, bermutu, terampil, ahli dan profesional, mampu belajar sepanjang hayat, serta memiliki kecakapan hidup yang dapat membantu dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan.
 7. Meningkatkan kualitas pendidikan sesuai standar pendidikan nasional dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta meningkatkan kualifikasi minimum bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
 8. Meningkatkan relevansi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan melalui peningkatan hasil penelitian, pengembangan dan penciptaan ilmu





- pengetahuan dan teknologi oleh perguruan tinggi serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat.
9. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen pelayanan pendidikan melalui peningkatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, serta efektivitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan.
 10. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik dan wawasan kebangsaan dikalangan anak usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme, pluralitas sosial dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik.
 11. Meningkatnya aktivitas riset serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
 12. Meningkatkan penguasaan IPTEK dan penerapan teknologi tepat guna secara optimal guna mendukung program pembangunan Kota Denpasar.
 13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
 14. Membentuk pusat kajian bersama antara pemerintah Kota Denpasar dengan Lembaga Pendidikan serta lembaga lainnya pada bidang pengembangan IPTEK.
 15. Pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor.
 16. Mengoptimalkan kualitas kelembagaan pendidikan politik, pembinaan kepemimpinan, pengembangan potensi





kewirausahaan, dan peningkatan keunggulan penguasaan iptek pemuda.

17. Membudayakan sportivitas olahraga sebagai elemen penting bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan keunggulan daya saing.
18. Menumbuhkembangkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia sejak dini melalui pembinaan dan pengembangan olahraga di sekolah.
19. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi.
20. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
21. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga termasuk kesehatan olahraga.
22. Meningkatkan minat / budaya baca masyarakat.

Hasil Analisis pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat pada Tahun 2017 belum dapat diukur karena BPS belum merilis Angka Indeks Pendidikan Kota Denpasar.

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6

Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
			Target	Realisasi	
1 Indeks Pendidikan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A
Rata-rata Capaian Kinerja					

Solusi :

- Menunggu rilis data dari BPS
- Merencanakan formulasi pengukuran yang baru
- Menentukan indikator sasaran yang measurable / dapat diukur oleh instansi terkait.



Walaupun Angka Indeks Pendidikan Kota Denpasar tahun 2017 belum dirilis oleh BPS, indikator-indikator lain dari capaian Pendidikan masih dapat diukur. Adapun capaian indikator tersebut antara lain :

Tabel 3.8
Tabel Capaian Indikator Pendidikan Kota Denpasar
Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		
			Target	Capaian	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya akses, mutu dan relevansi pendidikan.	APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD	99	99,72	
		APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI	103,00	107,59	
		APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI	92,08	97,79	
		APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs.	106.33	108.88	
		APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTs.	91,26	91,32	
		Angka Melek Huruf	98,05	98,68	
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,60	9,00	
		Rasio Guru dan Murid			
		a	SD/MI/Paket A (Per 1000 Murid)	27,90	28
		b	SMP/MTs/Paket B (Per 1000 Murid)	30,20	32
		Fasilitas Pendidikan			
		a	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	64,00	64
b	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	72,00	72		
2	Meningkatnya daya saing SDM	Angka Kelulusan (%)			
		a	Angka Kelulusan SD/MI	99,98	100
		b	Angka Kelulusan SMP/MTs	99,98	100
3	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Persentase Terlaksananya Peringatan Hari Sumpah Pemuda	100	100	
4	Meningkatnya akses dan partisipasi	Persentase terlaksananya Pelatihan, Lomba dan Lainnya Bagi Pemuda	100	100	



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017	
			Target	Capaian
1	2	3	4	5
	masyarakat secara lebih luas dan merata dalam kesehatan dan kebugaran jasmani	Persentase Terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni Ditingkat Daerah dan Nasional	100	100
		Persentase Terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni di Tingkat Kecamatan	100	100
		Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	100	100
5	Meningkatnya jumlah sarana dan prasana olahraga	Jumlah Gedung Olah Raga	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar, 2018

Bila dibandingkan dengan capaian Indikator Pendidikan tahun 2016 maka dapat dilihat bahwa, angka melek huruf penduduk Kota Denpasar pada tahun 2016 mencapai 92,82 persen yang berarti bahwa 92,82 persen penduduk Denpasar sudah dapat membaca dan menulis. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan juga menentukan keberhasilan program pendidikan. Rata-rata lama sekolah penduduk Denpasar tahun 2015 sebesar 10,96 tahun. Angka Partisipasi Sekolah untuk umur 7-12 tahun sebesar 98,23 persen, Angka Partisipasi Sekolah umur 13-15 tahun sebesar 97,85 persen dan Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 tahun sebesar 78,19 persen. Secara rinci dapat diuraikan pada tabel berikut :





Tabel 3.9
Indikator Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2014-2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Melek Huruf (persen)	97,95	98,01	97,96	92,82
	- Laki-Laki	98,94	99,34	99,31	89,23
	- Perempuan	94,83	96,61	96,56	96,37
2.	Rata-rata Lama Sekolah (persen)	10,98	10,96	11,02	10,96
3.	Angka Partisipasi Sekolah (persen)				
	7 – 12 tahun	100,00	97,85	99,33	98,23
	13 – 15 tahun	95,83	99,06	97,54	97,85
	16 – 18 tahun	73,95	81,61	85,94	78,19

Sumber Diolah :BPS Kota Denpasar, 2017

7) Sasaran Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak

Kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan memang sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kesetaraan gender, penegakkan hak asasi manusia, penegakkan martabat dan kapabilitas perempuan merupakan syarat utama dalam kehidupan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Definisi pembangunan berkelanjutan sendiri adalah pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan yang menjamin kesejahteraan manusia, kesatuan ekologi, kesetaraan, dan keadilan sosial generasi saat ini dan dimasa mendatang. Sehingga sangat jelas bahwa kesetaraan gender merupakan isu utama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Isu kesetaraan gender di Kota Denpasar antara lain :





1. Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif (DPRD), yang juga dipengaruhi oleh faktor budaya
2. Belum maksimalnya tingkat pendidikan perempuan, serta belum beraninya perempuan untuk tampil dan perempuan juga disibukkan mengurus RT
3. Belum Optimalnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
4. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pelayanan KB

Kebijakan pembangunan gender di Kota Denpasar diarahkan pada :

1. Peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik melalui perumusan kebijakan , sosialisasi, advokasi partai politik, advokasi organisasi perempuan dan Pelatihan pendidikan politik perempuan.
2. Peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi melalui perumusan kebijakan, sosialisasi, advokasi pelatihan di bidang ekonomi.
3. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan melalui Advokasi dan sosialisasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak terkait, koordinasi, pelatihan, pendampingan, pengembangan KIE, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak, serta pencatatan data kekerasan/kasus perempuan dan/atau anak.
4. Penguatan kelembagaan dan pembentukan kelembagaan layanan kualitas keluarga melalui Advokasi dan sosialisasi





kebijakan, koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan kualitas keluarga dlm mewujudkan kesetaraan Gender dan Hak Anak.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak pada tahun 2017 dirinci pada Tabel berikut :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
			Target	Realisasi	
1 Indeks Pembangunan Gender	Indeks	72,82	78,00	96,07	123,17
2 Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	56,66	60,00	58,50	97,50
3 Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Nindya	Nindya	Nindya	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja					106,89

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender realisasinya melampaui target, indikator sasaran Indeks Pemberdayaan Gender realisasinya tidak target dan indikator sasaran kategori kota layak anak mencapai target. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2017 sebesar 106,89% (Baik Sekali).

Indek Pembangunan Gender dipakai untuk mengukur angka rata-rata pencapaian kemampuan dasar dengan penyesuaian untuk memperhitungkan ketimpangan gender. Titik berat pembangunan gender adalah pemberdayaan manusia tanpa membedakan gender sehingga mereka memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan





taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan. Indeks Pembangunan Gender yang dilakukannya oleh BPS Kota Denpasar sebesar 96,07% serta ada upaya dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pembangunangender di Kota Denpasar.

Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak di Kota Denpasar Tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak
Kota Denpasar Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Indek Pembangunan Gender	95.85	96,00	96.55	96.07	96,55
2	Indek Pemberdayaan Gender	56.28	59.66	58.25	58.50	58,50
3	Kategori Kota Layak Anak	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya

Sumber : Dinas PPPA&PPKB Kota Denpasar, 2017

8) Sasaran Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan

Kekumuhan yang terjadi di Kota Denpasar memiliki karakteristik tersendiri, dimana kekumuhan terjadi pada lahan persil hak milik, yang disewakan dalam waktu jangka panjang. Sinergitas penanganan kumuh terus dilakukan sehingga terjadi keterpaduan pendanaan dan program antara pemerintah pusat dengan daerah maupun antar OPD di Kota Denpasar.

Pada tahun 2017 upaya yang dilakukan untuk mengurangi permukiman kumuh di Kota Denpasar baru sebatas menyiapkan perencanaan dengan melakukan pendataan secara mendetail untuk mengidentifikasi kondisi kekumuhan yang





terjadi. Pada tahun ini juga dilakukan upaya menyiapkan produk hukum terkait dengan kekumuhan sebagai dasar untuk melaksanakan program kegiatan kedepan.

Capaian terhadap upaya Mengurangi Luasan Permukiman Kumuh Perkotaan di tahun 2017 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8
Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017	
			Target	Realisasi		
1	Luas Permukiman Kumuh	Persen	Luas Permukiman Kumuh seluas 184,4059 ha	1,65	0,36	21,19
Rata-rata Capaian Kinerja						21,19

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan realisasinya hanya mencapai 0,36% dari luas permukiman kumuh di Kota Denpasar atau dapat dikatakan capaian kinerjanya hanya mencapai 21,19% (Kurang). Hal ini disebabkan karena kekumuhan yang terjadi di Kota Denpasar memiliki karakteristik tersendiri, dimana kekumuhan yang terjadi pada lahan persil hak milik, yang disewakan dalam jangka waktu yang panjang.





9) Sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

Kota Denpasar merupakan Ibu Kota Provinsi Bali yang telah bertumbuh menjadi kota metropolitan dengan beragam aktivitas yang membutuhkan kecepatan mobilitas. Disisi lain Kota Denpasar juga merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, perekonomian dan jasa lainnya dan terletak pada lintasan pergerakan penduduk antar kabupaten.

Kondisi dan ketersediaan infrastruktur di Kota Denpasar sudah cukup memadai dan berkualitas baik, namun demikian masih dibutuhkan pemerataan serta peningkatan kualitas dan kuantitas baik melalui pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun.

Tantangan permasalahan pembangunan infrastruktur yang harus disikapi antara lain kurangnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengendalian, pengawasan, dan pemeliharaan infrastruktur, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, peraturan pemerintah yang sering berubah dan tumpang tindih antar peraturan/perundangan merupakan tantangan permasalahan eksternal yang harus disikapi guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran serta untuk mewujudkan tingkat, kondisi ketersediaan, kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, serta untuk mendukung terciptanya kehidupan yang aman, produktif





dan berkelanjutan sehingga terwujudnya keadaan masyarakat yang semakin sejahtera dan berdaya saing maka kebijakan pembangunan infrastruktur diarahkan pada :

1. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung pembangunan kota
2. Meningkatkan kualitas dan mengendalikan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, produktif, berkelanjutan sesuai budaya setempat
3. Mengendalikan jaringan drainase kota yang terintegrasi untuk menanggulangi banjir
4. Mengembangkan pengelolaan persampahan dan air limbah secara profesional dan terintegrasi
5. Mengembangkan penyediaan air bersih dan jaringannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
6. Mengembangkan pengelolaan sumber daya air, meningkatkan dan tetap menjaga ketersediaan dan kualitas sumber daya air dalam menunjang keseimbangan lingkungan hidup dalam kerangka Sarbagita
7. Mengembangkan dan tetap menjaga ekosistem sungai
8. Mengembangkan pengelolaan sistem jaringan irigasi dalam upaya pembangunan bidang pengairan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan
9. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya sesuai pola ruang dan fungsi ruang di Kota Denpasar
10. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota Denpasar, termasuk pemberian Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung





11. Mengembangkan pola peningkatan kualitas, daya saing dan kompetensi tenaga kerja dan badan usaha jasa konstruksi melalui pembinaan dan sertifikasi keterampilan.
12. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Aparatur.

Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Infrastruktur di Kota Denpasar pada tahun 2017 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
			Target	Realisasi	
1 Jalan Kondisi Baik	Persen	57,98	60,66	87,95	144,35
2 Titik Genangan	Persen	8 titik	10	10	100,00
3 Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi	Persen	80.261 SR	44,76	63,00	140,75
4 Penduduk Memanfaatkan Air Bersih terlindungi	Persen	426.940 orang	47,64	69,72	146,35
Rata-rata Capaian Kinerja					133,02

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator telah mencapai target, dan 3 indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur realisasinya telah melampaui target. Rata-rata capaiannya sebesar 133,02% (Baik Sekali).

Kualitas jalan yang baik dan mantap di Kota Denpasar sangat dibutuhkan, mengingat tingkat kepadatan lalu lintas dan mobilitas masyarakat yang berdomisili di Kota Denpasar maupun masyarakat komuter yang menuju/melintasi Kota Denpasar sangat tinggi sehingga akan meningkatkan resiko keselamatan pengguna jalan apabila kondisi/kualitas jalan yang tidak baik dan tidak mantap. Masalah kemandapan jalan





menjadikan perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Denpasar. Secara bertahap prosentase kemantapan jalan-jalan utama yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar akan terus ditingkatkan dan dijaga. Dengan kualitas jalan yang baik dan mantap diharapkan akan dapat meningkatkan kenyamanan pengguna jalan dan mengurangi resiko keselamatan dan tingkat kecelakaan pengguna jalan di Kota Denpasar.

Disamping kemantapan jalan, umur pakai jalan juga perlu mendapatkan perhatian, mengingat semakin panjang umur jalan maka intensitas perbaikan akan semakin berkurang sehingga keamanan, kenyamanan dan gangguan terhadap pengguna jalan dalam rangka pemeliharaan jalan akan semakin sedikit. Semakin panjang umur pakai jalan utama kota, mencerminkan semakin baiknya kualitas jalan dan juga akan berdampak pada semakin tingginya efisiensi anggaran untuk pemeliharaan jalan pertahunnya dan efisiensi biaya tersebut dapat dialihkan untuk peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan atau pembangunan infrastruktur lainnya. Dengan semakin berkembangnya wilayah permukiman masyarakat di Kota Denpasar maka Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara bertahap meningkatkan aksesibilitas untuk memudahkan masyarakat ke pusat-pusat kegiatan (PK). Dengan meningkatnya aksesibilitas menuju PK diharapkan dapat mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat sebagaimana misi pemerintah Kota Denpasar.

Kemacetan lalu lintas di Kota Denpasar merupakan masalah yang mendapatkan perhatian khusus mengingat Kota Denpasar sebagai daerah pariwisata, perlintasan transportasi





darat antar daerah dan antar pulau serta pusat ibukota Propinsi Bali. Kemacetan lalu lintas khususnya pada jalan utama di Kota Denpasar disebabkan berbagai faktor selain karena kualitas jalan dan kuantitas jalan adalah disebabkan semakin bertambahnya volume kendaraan bermotor, tidak disiplinnya pengguna jalan dalam berlalu lintas, parkir kendaraan di badan jalan, penggunaan kendaraan bermotor (mobil) untuk mengantar dan menjemput siswa sekolah, dan banyaknya persimpangan jalan yang menyebabkan melambatnya laju kendaraan. Mengingat rata-rata bentang jalan di wilayah Kota Denpasar yang pendek dan dengan lebar yang tidak sepadan dengan volume kendaraan, mengakibatkan kemacetan di satu ruas jalan berdampak pada ruas jalan yang lainnya. Terkait dengan hal tersebut di atas Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan upaya-upaya pemeliharaan jalan guna mengurangi pelambatan laju kendaraan dan melakukan peningkatan jalan khususnya jalan tembus jalan alternatif untuk memecah arus lalu lintas dengan maksud untuk mengurangi kemacetan pada satu titik ruas jalan yang dapat berdampak kemacetan pada ruas jalan yang lain.

Penanganan daerah rawan genangan / banjir dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah genangan yang cukup tinggi dan berdampak besar bagi masyarakat, khususnya dampak bagi kelancaran transportasi, kesehatan lingkungan dan fasilitas permukiman masyarakat. Titik daerah rawan genangan di Kota Denpasar selalu berubah seiring dengan berkembangnya daerah permukiman masyarakat dan adanya pengalihan fungsi lahan (terlampir peta daerah rawan genangan/banjir). Namun demikian Pemerintah Kota Denpasar mengupayakan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah





meningkatnya daerah rawan genangan/banjir guna mencegah sebaran dampak genangan/banjir. Keterbatasan dana mengharuskan memilih prioritas dalam penanganannya. Tahun 2017 ditargetkan adanya pengurangan 6 lokasi genangan dan dapat direalisasikan semuanya yang berarti tingkat pencapaiannya sebesar 100%.

Tujuan 3. Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)

10) Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel

Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari sebuah reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya.

Terdapat fakta bahwa betapa pentingnya pelayanan publik adalah keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan. Kebijakan yang paling mendasar adalah mengubah mindset para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar





pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan

Untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*) dalam tahun 2017 ditetapkan sasaran strategis yaitu, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel jabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
			Target	Realisasi	
1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,00	80,50	84,99	105,58
2 Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	WTP	WTP	WTP	100
3 Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B	B	B	100
Rata-rata Capaian Kinerja					101,86

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel realisasinya telah mencapai target dan 1 indikator melampaui target. Rata-rata capaiannya sebesar 101,86% (Baik Sekali).

Sewaka Dharma merupakan filosofi yang digali dari Budaya Bali untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sewaka Dharma mengandung arti bahwa melayani merupakan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2017





kewajiban. Pemahaman ini diharapkan mampu merubah mindset aparatur bahwa mereka merupakan pelayan masyarakat dan melayani sebagai bagian dari ibadah kebaikan. Indeks Survey kepuasan layanan masyarakat ini diperoleh dari merata-ratakan nilai indeks kepuasan layanan masyarakat pada OPD Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Puskesmas, dan Rumah Sakit Wangaya.

Didalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2017 kembali menerima Penghargaan dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, karena atas hasil pemeriksaan keuangan laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016. Pemerintah Kota Denpasar telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.



Gambar 3.11.

Walikota Denpasar (Bapak I.B Rai Dharmawijaya Mantra) menerima Piagam Penghargaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Kementerian Keuangan RI dengan Predikat WTP





Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kota Denpasar pada tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 62,91 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Denpasar sudah menunjukkan hasil yang baik. Namun ada hal-hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana telah tertuang dalam rekomendasi dari Kementerian PAN & RB kepada Walikota Denpasar untuk perbaikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar ke depan.

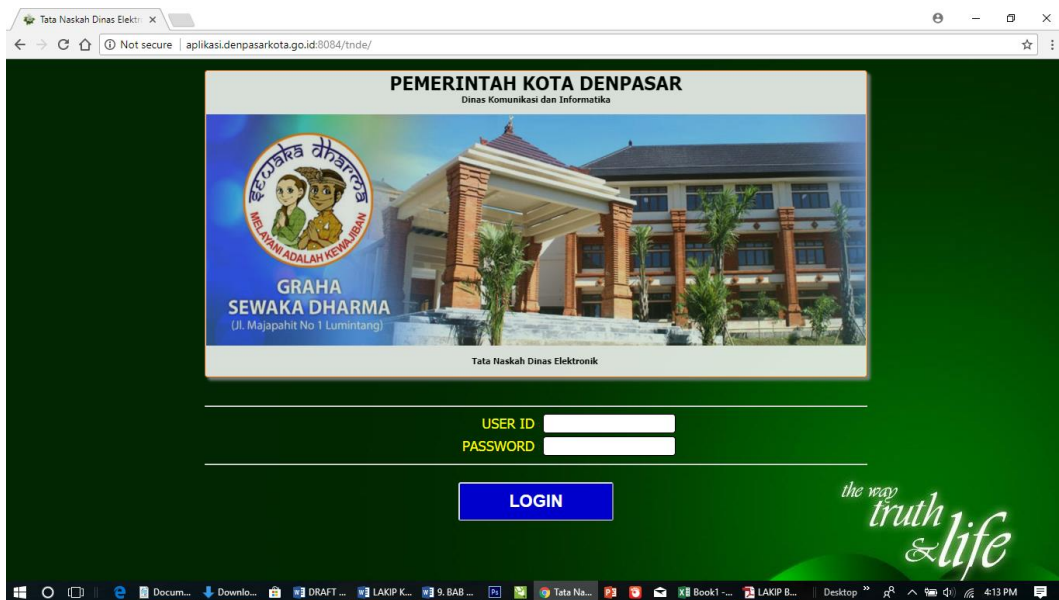
Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 telah dilakukan dan sudah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 yang ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2017. Didalam Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya didalam penyelarasan penjabaran indikator kinerja utama sampai ke level eselon IV telah dilakukan perubahan mekanisme dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mana sebelum Forum Perangkat Daerah dilakukan dengan acara Ceremonial, sekarang dilakukan dengan presentasi masing-





masing Kepala Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah memaparkan keselarasan IKU Daerah ke IKU Perangkat Daerah. Selain dari mengubah mekanisme perencanaan, juga telah dilaksanakan sosialisasi penyusunan LAKIP kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dengan mendatangkan narasumber baik dari Pemerintah Provinsi Bali maupun dari Pemerintah Pusat.

Didalam mengintegrasikan informasi keuangan dengan tingkat kinerja, Pemerintah Kota Denpasar telah membangun sistem aplikasi e-Kinerja. Aplikasi e-Kinerja yang diterapkan mulai awal tahun anggaran 2017 telah mengacu pada sasaran kinerja pegawai (SKP) sesuai dengan uraian tugas masing-masing pegawai. Dengan adanya "E-Kinerja" seluruh pegawai dituntut untuk melakukan pelaporan secara elektronik dan mendapat persetujuan dari atasannya masing-masing. Setiap pelaporan yang dilakukan itu mendapat penilaian (reward).



Gambar 3.12.
Aplikasi e-kinerja Pemerintah Kota Denpasar





Tujuan 4. Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan Bertumpu Pada Ekonomi Kerakyatan

11) Sasaran Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan

Sebagai daerah perkotaan di Denpasar terdapat banyak perusahaan industri mulai dari home industri hingga industri dengan kapasitas besar yang melibatkan banyak tenaga kerja. Selama tiga tahun terakhir, PDRB lapangan usaha industri terhadap PDRB Kota Denpasar terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, PDRB industri mencapai 2.808,47 milyar rupiah. Tidak hanya secara nominal, nilai tambah riil dari industri juga terus meningkat dan mencapai 2.079,53 milyar rupiah pada tahun 2016. Menunjukkan kontribusi kategori industri di Denpasar tumbuh positif dalam menunjang perekonomian. Ditinjau dari laju pertumbuhan riil PDRB Kota Denpasar menurut lapangan usaha selama kurun waktu dari tahun 2014 s.d 2016, laju pertumbuhan riil PDRB dari industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang melambat. Pada tahun 2014 laju pertumbuhannya sebesar 8,06 persen, pada tahun 2015 mengalami perlambatan sehingga pertumbuhannya menjadi sebesar 3,48 persen. Pada tahun 2016 juga kembali mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi sebesar 3,16 persen.

Berbeda halnya pada sektor perdagangan. Perdagangan di Kota Denpasar selama kurun waktu tahun 2014 s.d 2016 laju pertumbuhan riil PDRB Kota Denpasar pada lapangan usaha





perdagangan mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2014 laju pertumbuhannya sebesar 6,64 persen. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi sebesar 9,59 persen. Namun pada tahun 2016 kembali mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi sebesar 6,46 persen.

Capaian Sasaran Strategis Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11

Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
			Target	Realisasi	
1 Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persen	3,16	3	3	100
2 Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	Persen	6,46	6	6	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan realisasinya telah mencapai target. Rata-rata capaiannya sebesar 100,00% (Baik).





12) Sasaran Meningkatnya Kinerja Lembaga Perkreditan Desa

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu unsur kelembagan Desa Pakraman yang menjalankan fungsi keuangan Desa Pakraman untuk mengelola potensi keuangan Desa Pakraman. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang bernaung dibawah Desa Pakraman memiliki fungsi strategis dalam menggerakkan berbagai sektor ekonomi di pedesaan. Keuntungan LPD digunakan untuk membangun kehidupan religius warga berikut kegiatan upacaranya. Pemerintah Kota Denpasar melakukan pembinaan untuk mendorong agar seluruh LPD memiliki likuiditas yang baik sehingga masuk dalam katagori sehat.

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Lembaga Perkreditan Desa disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12

Meningkatnya Kinerja Lembaga Perkreditan Desa

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
			Target	Realisasi	
1 Lembaga Perkreditan Desa Sehat	Persen	100	100	97,14	97,14
Rata-rata Capaian Kinerja					

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Lembaga Perkreditan Desa Sehat realisasinya telah mencapai target. Rata-rata capaiannya sebesar 97,14% (Baik).





Setiap Desa Pakraman di Kota Denpasar memiliki LPD sehingga LPD di Kota Denpasar berjumlah 35 unit. Sampai dengan tahun 2017, capaian LPD yang termasuk dalam kategori sehat sebanyak 34 LPD dan sebanyak 1 LPD dalam kategori kurang sehat. Jumlah LPD dalam kategori sehat mengalami penurunan dari tahun sebelum, yaitu pada tahun 2016 seluruh LPD di Kota Denpasar dalam kategori sehat. Hal ini disebabkan karena 1 LPD tersebut masih kurang modal yang disetor sehingga berpengaruh terhadap tingkat likuiditasnya.

13) Sasaran Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil

Sasaran Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil dimaksudkan sebagai upaya membangun dengan sasaran masyarakat kecil melalui pendekatan ekonomi. Hal ini dilakukan agar masyarakat kecil memiliki kesempatan yang lebih luas untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga secara ekonomi akan bergerak menjauh dari garis kemiskinan dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan di Kota Denpasar.

Disadari selama ini masyarakat kecil memiliki keterbatasan sumber daya untuk mengembangkan usaha akibat minimnya agunan yang dimiliki untuk mengakses permodalan. Kecilnya permodalan berkaitan erat dengan besaran skala usaha yang dilakukan. Atas dasar pemahan tersebut, penerbitan ijin SIUP Kecil dapat dikaitkan dengan aktifitas peningkatan kegiatan ekonomi kerakyatan.

Koperasi dan UMKM merupakan bagian penting yang mencerminkan akan kemajuan kesejahteraan bagian terbesar rakyat Bali khususnya masyarakat di Kota Denpasar. Ini





mengingat besarnya potensi UMKM yang ditunjukkan oleh keberadaannya sejumlah 30.145 usaha mikro dan koperasi 1.064 unit sampai dengan tahun 2017 dengan kegiatan usaha mencakup hampir semua lapangan usaha, serta tersebar diseluruh Kecamatan di Kota Denpasar. Oleh Karena itu, pemberdayaan koperasi dan UMKM menjadi semakin strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan kerja yang lebih luas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin.

Secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas sumberdaya seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen, serta informasi pasar. Masalah SDM ini akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen. Demikian pula keterbatasan akses kepada modal masih akan dihadapi sebagian besar UMKM terutama kredit investasi. Untuk menentukan strategi perlu memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal.



Gambar 3.13.
Walikota Denpasar menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Koperasi Berprestasi





Strategi dan Kebijakan strategi yang digunakan dalam mendorong pengembangan Koperasi dan UMKM dengan cara :

- (1) Mengembangkan, meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi
- (2) Meningkatkan Pembinaan dan Kemitraan UMKM

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13

Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
			Target	Realisasi	
1 Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil	Persen	30.066 Usaha Mikro	0,5	0,5	100,00
2 Koperasi yang SHU-nya meningkat	Persen	1.049 Koperasi Aktif	60,00	60,48	100,80
Rata-rata Capaian Kinerja					100,40

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil realisasinya telah mencapai target dan indikator sasaran Koperasi yang SHU-nya meningkat realisasinya melampaui target. Rata-rata capaiannya sebesar 100,40% (Baik Sekali).

Pada indikator Persentase usaha mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil mencapai realisasi sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 0,50 % atau sebesar 0,50% (150 Usaha Mikro yang meningkat menjadi usaha Kecil), untuk pencapaian Persentase usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi usaha kecil, dilakukan dengan melakukan pembinaan, memberikan informasi pasar terkait isu – isu perekonomian yang





berkembang, memfasilitasi akses ke Lembaga produktif untuk mengakses permodalan. Adapun langkah – langkah yang dimaksud, seperti :

1. Pembinaan bagi para Pelaku Usaha Mikro selain difokuskan dalam hal untuk peningkatan kuantitas produk juga dilaksanakan untuk peningkatan kualitas SDM bagi UMKM tersebut. Pembinaan dilakukan selain dengan turun kelapangan juga Pelaku UMKM di berikan Pelatihan – pelatihan juga sosialisasi tentang kelembagaan UMKM, dengan harapan dapat meningkatkan keterampilan serta peningkatan kuantitas produk sehingga dapat meningkatkan omzet penjualan, secara tidak langsung akan meningkat perekonomian dari pelaku UMKM maupun dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru.



Gambar 3.14.
Pembinaan ke Lapangan Bagi UMKM Kota Denpasar





2. Penyediaan Informasi Pasar

Perkembangan UMKM membutuhkan adanya jaringan kemitraan antar lembaga sehingga akses informasi mengenai permodalan, pemasaran produk hasil UMKM cepat bisa diketahui. Membangun kemitraan antara UMKM serta pengusaha besar akan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha UMKM. Pengusaha besar mempunyai kewajiban untuk menjadi mitra bagi para pelaku UMKM. Tumbuhnya wira usaha muda/baru diberbagai sektor diharapkan mampu menumbuhkan UMKM. Menumbuhkan jiwa wirausaha dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat mempunyai nilai strategis dalam menghadapi dunia usaha. Wirausaha dibidang UMKM akan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dunia usaha dan perekonomian daerah. Dalam hal terbatasnya akses permodalan. Terlebih lagi pelaku usaha UMKM di sektor informal, mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan penguatan modal untuk usahanya. Dimana Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM berkewajiban untuk mengupayakan memfasilitasi para pelaku UMKM untuk memfasilitasi dengan kalangan Perbankan dan Pengusaha besar dan BUMN maupun BUMD agar terbangun temu kemitraan. Disamping itu adanya akses perbankan dan lembaga penjaminan kredit daerah diharapkan mampu mengatasi permasalahan penguatan modal bagi para pelaku UMKM. Dalam pemasaran produk hasil UMKM dilakukan baik dalam ajang Lokal maupun Nasional.





Untuk lebih meningkatkan informasi pasar bagi UMKM telah dilakukan dengan berbagai langkah antara lain :

- a. Peningkatan Kemitraan. Kemitraan yang dilaksanakan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produksi maupun penjualan, dimana dalam hal untuk memenuhi bahan baku produksi atau pun melakukan hubungan kerjasama saling bertukar produk yang dihasilkan. Dengan harapan dapat meningkatkan penjualan ataupun menekan biaya produksi secara signifikan dari bahan baku yang diperolehnya.



Gambar 3.15.

Pelaksanaan Kemitraan Ke Lombok bagi UMKM terkait dalam Bahan Baku

- b. Pameran Dalam maupun Luar Daerah, dalam rangka lebih memperkenalkan produk UMKM yang dihasilkan dilakukan dengan mengikutsertakan UMKM binaan dalam ajang promosi baik di dalam Pameran tingkat lokal juga dilaksanakan dalam ajang nasional. Dengan tujuan lebih memperkenalkan produk yang dihasilkan, dimana agar para





UMKM lebih meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan lebih dapat dikenal oleh masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional.

Dimana setiap ajang promosi yang dilaksanakan selalu berusaha untuk mengandeng para pihak Perbankan ataupun Pengusaha besar dengan harapan agar nantinya dapat melihat dari pada potensi dari produk UMKM.



Gambar 3.16.

Fasilitasi dengan mengikutsertakan UMKM Kota Denpasar pada Pameran Inacraft di Jakarta Convention Centre Jakarta





Pada indikator Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat mencapai realisasi sebesar 100,80 % dari target yang ditetapkan sebesar 60 % atau sebesar 60,48%, (638 unit koperasi) untuk pencapaian persentase koperasi yang SHU nya meningkat, dilakukan dengan melakukan pembinaan, pengawasan, memberikan informasi pasar terkait isu – isu perekonomian yang berkembang, memfasilitasi akses ke Lembaga produktif untuk mengakses permodalan. Adapun langkah – langkah yang dimaksud, seperti :

1. Pembinaan.

Di dalam melakukan pembina terhadap koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas para pengelola koperasi, pembinaan dilakukan baik dengan langsung ke koperasi ataupun dengan mengikuti sertakan para pengelola koperasi melalui Pendidikan atau Bimtek – Bimtek yang berkaitan langsung dengan pengetahuan tata cara pengelolaan koperasi yang sesuai dengan jati diri. sehingga dapat diketahui apa saja permasalahan yang dihadapi oleh koperasi.



Gambar 3.17.

Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Koperasi Bagi
Pengelola Koperasi Untuk Peningkatan Kualitas SDM
Pengelola Koperasi





2. Pengawasan.

Untuk meningkatkan kinerja koperasi pengawasan sangatlah penting dilaksanakan dimana akan menambah kepercayaan anggota terhadap koperasi dan akan meningkatkan perekonomian daerah, dimana akan mengurangi resiko dari investasi illegal yang merugikan masyarakat dimana mengatasnamakan koperasi. Pengawasan berkelanjutan bertujuan agar koperasi tidak keluar dari koridor jati diri koperasi.



Gambar 3.18.

Pembinaan Kepatuhan Kepada Koperasi

3. Penyediaan Informasi Pasar.

Untuk menghadapi permasalahan terbatasnya akses permodalan. Dimana pemerintah daerah berkewajiban untuk mengupayakan memfasilitasi para pelaku Koperasi dengan kalangan Perbankan dan Pengusaha besar dan BUMN maupun BUMD agar terbangun temu kemitraan. Disamping itu adanya akses perbankan dan lembaga penjaminan kredit daerah diharapkan mampu mengatasi





permasalahan penguatan modal bagi para pelaku koperasi. Dimana Dinas Koperasi turun secara langsung ke Koperasi menyampaikan informasi Permodalan agar dimana koperasi yang membutuhkan permodalan dapat mengajukan lewat KUR maupun ke LPDB-kemenkop UKMRI.

14) Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

Arah Kebijakan Strategis Bidang Investasi di Kota Denpasar diarahkan pada penyederhanaan terhadap perijinan dan meningkatkan kualitas laju perijinan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Investasidisajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.18 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14

Meningkatnya Nilai Investasi

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
			Target	Realisasi	
1 Investasi Yang Tercatat pada PTSP	Persen	4.804.140.121.700,00	2,5	34,30	1.372,16
Rata-rata Capaian Kinerja					1.372,16

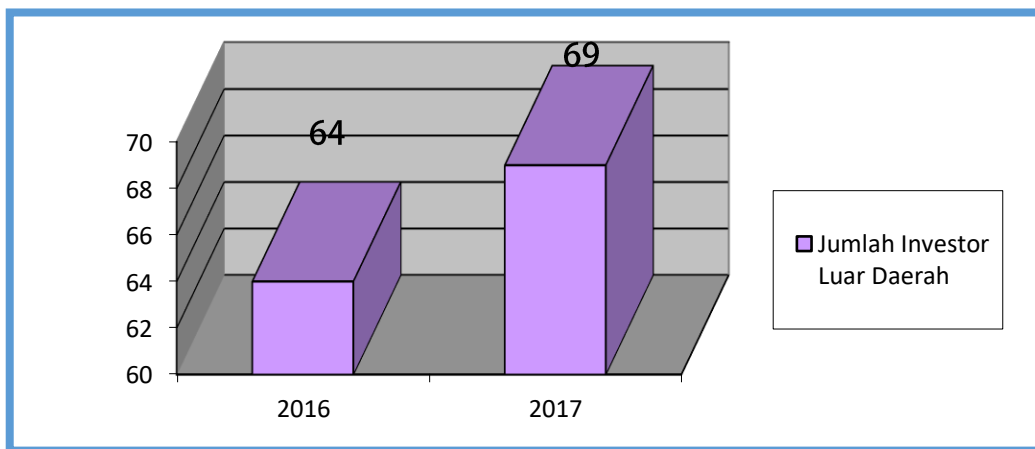
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Investasi Yang Tercatat pada PTSP realisasinya telah melampaui target. Rata-rata capaiannya sebesar 1,372,16% (Baik Sekali).

Pengukuran indikator kinerja Persentase peningkatan Jumlah Investor Luar Daerah di Kota Denpasar mulai lakukan pada tahun 2017 setelah adanya perubahan nomenklatur dari

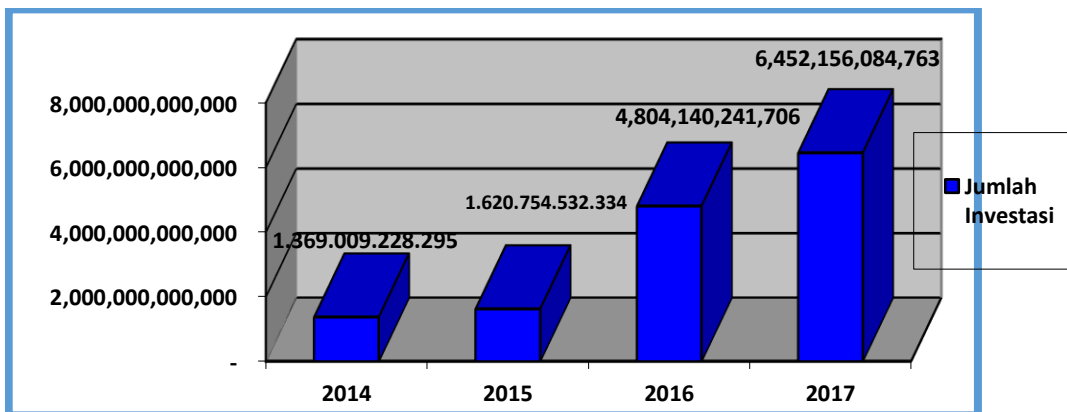




Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal menjadi Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Denpasar. Capaian indikator tersebut pada tahun 2017 sebesar peningkatan 7,81% dari target yang ditetapkan sebesar 2%. Adapun jumlah investor luar daerah pada tahun 2016 sebanyak 64 investor luar daerah dan tahun 2017 sebanyak 69 investor luar daerah.



Gambar 3.19.
Jumlah Investor Luar Daerah di Kota Denpasar Tahun 2016-2017



Gambar 3.20.
Jumlah Investasi di Kota Denpasar Tahun 2014-2017





Pada Capaian indikator kinerja Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar dari tahun 2013 S/d 2016 mengalami fluktuasi dan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 34,30 % dari tahun 2016 dan apabila dibandingkan dengan target maka pencapaian tahun 2017 sebesar 1.715 %. Adapun jumlah investasi tahun 2013 sebesar Rp.3.263.346.102.926,00, tahun 2014 sebesar Rp.1.369.009.228.295,00, tahun 2015 sebesar Rp.1.620.754.532.334,00 tahun 2016 sebesar Rp.4.804.140.241.706,00 dan tahun 2017 sebesar Rp.6.452.156.084.763,00.

15) Sasaran Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya

Sebagai ibukota Provinsi Bali, Kota Denpasar memiliki banyak objek wisata yang dapat dikunjungi, dan didukung berbagai fasilitas wisata yang lengkap sehingga membuat liburan para wisatawan menjadi menyenangkan. Kota Denpasar merupakan kota di Pulau Bali yang memiliki pertumbuhan industri pariwisata yang baik. Kota Denpasar juga menjadi pusat kegiatan bisnis, dan menempatkan kota ini sebagai daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan tinggi di Provinsi Bali.

Pemerintah Kota Denpasar terus berupaya mendorong pengembangan kepariwisataan di Kota Denpasar, yang tidak terlepas dari arah dan kebijaksanaan kepariwisataan Provinsi Bali yang mengembangkan pariwisata budaya dengan didukung budaya Bali yang bernafaskan agama Hindu. Selain itu pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan bentuk pelayanan yaitu akomodasi, transportasi dan jasa-jasa lainnya.





Langkah-langkah terarah dan terpadu tersebut terus ditingkatkan untuk mendukung kepariwisataan. Diharapkan upaya pembangunan dilakukan dapat mendukung perkembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar.

Arah Kebijakan Strategis Bidang Pariwisata di Kota Denpasar diarahkan pada :

- (1) Mengembangkan pariwisata budaya berwawasan lingkungan yang dijiwai agama Hindu dengan mengembangkan obyek, daya tarik wisata, dan atraksi wisata, pembinaan dan peningkatan kesadaran peran aktif masyarakat termasuk desa adat.
- (2) Mengembangkan fasilitas pengelolaan industri kepariwisataan dengan mengembangkan koordiansi dengan pihak-pihak komponen pariwisata sebagai sektor unggulan sehingga mampu memberdayakan perekonomian rakyat dalam rangka mewujudkan perekonomian kerakyatan.
- (3) Mengembangkan pengelolaan kepariwisataan melalui teknologi informasi.



Gambar 3.21.
Promisi Pariwisata Budaya Kota Denpasar di TMII Jakarta



Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15
Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
			Target	Realisasi	
1 Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	500.000	548.813	609.795,00	111
2 Lama Tinggal Wisatawan					
- Asing	Hari	3,00	3,12	3,12	100
- Domestik	Hari	3,00	3,00	3,00	100
3 Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan	Juta Rupiah	256.500,00	287.571,14	287.571	112
Rata-rata Capaian Kinerja					107,67

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan dan indikator sasaran Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, realisasinya telah melampaui target dan indikator sasaran Lama Tinggal Wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik realisasinya telah mencapai mencapai target. Rata-rata capaiannya sebesar 107,67% (Baik Sekali).

Pengembangan kepariwisataan di Kota Denpasar terus diupayakan karena sektor ini merupakan salah satu tulang punggung (leading sector) bagi berkembangnya sektor-sektor lainnya di Kota Denpasar. Pengembangannya mengarah pada pengembangan pariwisata budaya sejalan dengan Visi “Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar pada tahun 2017 meningkat sebesar 5.82% atau dari target 576.254 orang menjadi 609.795 orang. Namun dibandingkan dengan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2017



tahun lalu, jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2017 menurun sebesar 2.5% atau dari 625.431 orang menjadi 609.795 orang. Hal ini sebagai akibat pengaruh Erupsi Gunung Agung yang terjadi pada bulan September sampai bulan Desember 2017. Dengan capaian ini, kinerja pencapaian IKU tahun 2017 diukur dari target RPJMD sudah melebihi pencapaian optimal.

Selanjutnya lama tinggal wisatawan menjadi sasaran penting selain meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung. Dengan lama tinggal wisatawan yang lebih panjang, diharapkan akan memberikan kesempatan bagi wisatawan dalam berbelanja atau membeli produk/jasa pendukung yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat dari sektor riil. Tercatat rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Denpasar masih tetap dipertahankan sesuai target yang sudah dipasang. Untuk wisatawan asing rata-rata lama tinggal selama 3.12 hari dan domestik sebesar 3.0 hari. Namun demikian upaya untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan mesti terus diupayakan baik melalui pengembangan destinasi wisata, pembangunan sarana prasana dan peningkatan jaringan promosi.

Meningkatnya penerimaan PAD yang bersumber dari sektor pariwisata di Kota Denpasar pada Tahun 2017 akan berdampak pada perkembangan tingkat perekonomian daerah. Tercatat kontribusi penerimaan pajak dari sektor pariwisata di Kota Denpasar pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan sebesar 12%.





Tujuan 5. Menguatkan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan / Ida Sang Hyang Widhi Wasa

16) Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mendorong kesadaran masyarakat Kota Denpasar guna peduli terhadap lingkungan hidupnya. Dalam upaya untuk pelestarian lingkungan hidup di Kota Denpasar, seluruh komponen masyarakat, pemerintah, pengusaha, serta sekolah wajib untuk berperan aktif karena kita perlu sadari bahwa lingkungan merupakan tempat manusia tinggal dan memperoleh penghidupan. Selain itu, Bali yang terkenal dengan wisata alamnya, sudah menjadi sebuah kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan agar para wisatawan nyaman saat berkunjung ke Bali dan masyarakatpun nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan Provinsi Bali mempunyai permasalahan yang kompleksitas termasuk masalah sampah, dimana sampai saat ini Kota Denpasar belum dapat secara maksimal dalam mengelola management persampahan disamping masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah sampah dan banyaknya pelanggaran-pelanggaran membuang sampah tidak pada tempatnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2017





Disadari/ tidak sebenarnya sampah merupakan bagian dari keseharian kita. Setiap aktivitas manusia, pasti menghasilkan buangan sampah. Persoalan seperti ini, tidak dapat dibiarkan begitu saja, kita harus bersikap untuk mengupayakan pengelolaan dan pemilihan sampah mulai dari tingkat rumah tangga.

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.20
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017
			Target	Realisasi	
1 Sampah Tereduksi	Persen	100	22,00	18,72	85,09
2 Indeks LH	Indeks	N/A	N/A	N/A	-
Rata-rata Capaian Kinerja					85,09

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Sampah Tereduksi tidak mencapai target dan indikator sasaran indeks Lingkungan Hidup belum dapat diukur karena survey untuk memperoleh data yang digunakan dalam menghitung Indeks Lingkungan Hidup belum dilaksanakan dan baru akan dilaksanakan pada tahun 2018. Rata-rata capaiannya sebesar 85,09% (Baik).

Indikator Sasaran Sampah Tereduksi terealisasi 80,09 persen dari target yang ditetapkan karena terkendala pada peralatan yang digunakan untuk mengolah sampah masih manual. Usaha untuk meningkatkan jumlah sampah yang tereduksi pada tahun 2018 Kota Denpasar telah menerima bantuan dari Pemerintah Jepang atas usulan dari LSM Jepang berupa mesin pengolah sampah mesin Midori Fermentation





Decompression (MFD). Mesin ini bekerja sangat simpel, yakni dengan memasukan semua sampah yang ada melalui sebuah fermentasi didalam mesin dengan suhu yang rendah, dan untuk menjalankan mesin boiler ini digerakan dengan panas kayu bakar. Setelah sampah diproses menjadi kering, diolah kembali oleh mesin yang nantinya menghasilkan kompos. Sementara untuk sampah plastik yang juga masuk kedalam mesin secara langsung akan dipilah dan diolah oleh mesin dan dapat dijadikan bahan bakar. Pemerintah Kota Denpasar berterimakasih dan mengapresiasi pihak Recotech Jepang karena sudah mensuport Pemerintah Kota Denpasar dalam teknologi pengolahan sampah. Jika percontohan ini berjalan dengan baik, tentu hal ini bisa kita terapkan nantinya di semua depo-depo yang dimiliki di Kota Denpasar terlebih lagi mesin ini tidak bising serta tidak mengeluarkan bau yang menyengat.

Pemecahan masalah sampah di Kota Denpasar dapat tercapai antara lain dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat Kota Denpasar dalam usaha Pengelolaan sampah. Pengelolaan dimaksud dimulai dari tingkat rumah tangga dapat dilakukan dengan cara merubah perilaku masyarakat dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi. Dalam upaya bersosialisasi kepada masyarakat perlu dibentuk tenaga juru pantau lingkungan (JUMALI). Juru Pantau Lingkungan (JUMALI) saat ini berjumlah 50 orang, JUMALI berperan penting sebagai mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi/ permasyarakat tata kelola persampahan, memonitoring/ mengidentifikasi, dan sumber sampah, melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat, berperan sebagai penggerak dan pengawasan terhadap masyarakat dalam pengumpulan dan pemilahan sampah, membantu kegiatan penyapuan, pengumpulan dan pengangkutan, membuat

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2017





rencana kerja tentang pemilahan , pengolahan dan pembuangan sesuai dengan tempat pembuangan sampah dan bertanggung jawab melaporkan segala hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas, itulah peran terbentuknya JUMALI yang ada di Kota Denpasar masalah pelaksanaan tugas dan fungsi JUMALI sudah maximal namun perlu secara terus menerus dibina dan ditingkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dikutip dari berita harian (Beritabali.com, denpasar). Warga Kota Denpasar kiti tak bisa membuang sampah sembarangan. Ada petugas “JUMALI” yang siap memberi sanksi tegas bagi warga yang masih jorok membuang sampah sembarangan tempat. Inilah dukungan media terhadap tanggung jawab dan tugas JUMALI menjaga Kota Denpasar agar selalu bersih menuju Denpasar Clean and Green.

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Denpasar dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar dengan total belanja langsung urusan wajib dan non urusan sebesar Rp. 960.663.429.437,99 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 820.870.580.647,75 atau dengan serapan dana APBD mencapai 85,45%. Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017, komposisi belanja APBD Kota Denpasar, sebagai berikut :





Tabel 3.21
Komposisi Belanja Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Anggaran 2017
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2017		
		ANGGARAN BELANJA	REALISASI ANGGARAN	
		Rp	Rp	%
1	2	3	5	6
1	Belanja Tidak Langsung	1.154.758.877.664,99	1.029.436.007.591,02	89,15
2	Belanja Langsung	1.125.624.329.241,86	973.963.089.952,02	86,53
	Jumlah	2.280.383.206.906,85	2.003.399.097.543,04	87,85

Sumber : BPKAD Kota Denpasar, 2017

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 50,64% dari realisasi belanja Kota Denpasar di tahun 2017 dan sisanya sebesar 49,36% disumbangkan oleh belanja langsung. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kota Denpasar yang diperjanjikan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.125.624.329.241,86. Realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis pemerintah Kota Denpasar tahun 2017 adalah sebesar Rp. 973.963.089.952,02 atau 86,53%, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.22
Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Denpasar
Per Sasaran Strategis Tahun 2017

No	SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	8.948.409.595,00	7.924.573.774,00	88,50
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	41.192.154.516,00	38.381.017.280,00	93,18
3	Mengentaskan Kemiskinan	6.569.731.400,00	5.725.029.630,00	87,14
4	Mengurangi Pengangguran	3.871.249.200,00	3.545.041.000,00	91,57
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	150.846.794.468,91	133.026.058.565,00	88,19
6	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	2.688.464.500,00	2.499.463.850,00	92,97
7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	171.733.595.467,00	166.043.262.319,00	96,69
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	20.373.333.078,00	14.300.359.368,00	70,19
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur	230.567.033.500,00	192.423.738.493,00	83,46
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	563.720.830.950,95	391.487.897.682,02	69,45
11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	22.857.203.900,00	19.098.626.076,00	83,56
12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	1.316.621.950,00	1.213.334.550,00	92,16



No	SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5
13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	7.744.068.100,00	6.904.923.450,00	89,16
14	Meningkatnya nilai investasi	2.185.615.000,00	1.426.810.340,00	65,28
15	Meningkatnya Pariwisata berbasis budaya	53.397.026.053,00	46.043.097.431,00	86,23
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	164.826.400,00	161.826.765,00	98,18
	Jumlah	1.125.624.329.241,86	973.963.089.952,02	86,53

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2017.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Denpasar, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.23
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Denpasar

No	Sasaran	Jumlah Indikatr	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	2		3	4	5
A	MISI 1				
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	2	100,50	7.924.573.774,00	88,50
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	1	Belum Ada Nilai	38.381.017.280,00	93,18
B	MISI 2				
3	Mengentaskan Kemiskinan	1	93,39	5.725.029.630,00	87,14
4	Mengurangi Pengangguran	1	Belum Ada Nilai	3.545.041.000,00	91,57
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1	Belum Ada Nilai	133.026.058.565,00	88,19
6	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	1	Belum Ada Nilai	2.499.463.850,00	92,97
7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	3	106,89	166.043.262.319,00	96,69
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	1	21,19	14.300.359.368,00	70,19
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur	4	133,02	192.423.738.493,00	83,46
C	MISI 3				
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	3	101,86	391.487.897.682,02	69,45



No	Sasaran	Jumlah Indikatr	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	2		3	4	5
D	MISI 4				
11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	2	100,00	19.098.626.076,00	83,56
12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	1	97,14	1.213.334.550,00	92,16
13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	2	100,40	6.904.923.450,00	89,16
14	Meningkatnya nila investasi	1	1.372,6	1.426.810.340,00	65,28
15	Meningkatnya Pariwisata berbasis budaya	3	107,67	46.043.097.431,00	86,23
E	MISI 5				
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2	85,09	161.826.765,00	98,18

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2017

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2017 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Denpasar.

D. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 16 sasaran menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100.00% yaitu sebanyak 13 sasaran strategis. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa



efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

Tabel 3.24
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2		3	4	5
A	MISI 1				
1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	2	100,50	88,50	12,00
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	1	Belum Ada Nilai	93,18	Belum Ada Nilai
B	MISI 2				
3	Mengentaskan Kemiskinan	1	93,39	87,14	6,25
4	Mengurangi Pengangguran	1	Belum Ada Nilai	91,57	Belum Ada Nilai
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1	Belum Ada Nilai	88,19	Belum Ada Nilai
6	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	1	Belum Ada Nilai	92,97	Belum Ada Nilai
7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	3	106,89	96,69	9,92
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	1	21,19	70,19	-49,00
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur	4	133,02	83,46	49,56
C	MISI 3				
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	3	101,86	69,45	32,41
D	MISI 4				



No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2		3	4	5
11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	2	100,00	83,56	16,44
12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	1	97,14	92,16	4,98
13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	2	100,40	89,16	16,44
14	Meningkatnya nilai investasi	1	1.372,6	65,28	1.307,32
15	Meningkatnya Pariwisata berbasis budaya	3	107,67	86,23	21,44
E	MISI 5				
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2	85,09	98,18	-13,09

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2017





BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Denpasar dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Hasil pengukuran pada 29 Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar yang telah ditetapkan pada tahun 2017, sebagai berikut :

- 9 indikator atau 31,03% kategori Baik Sekali dan melampaui target
- 9 indikator atau 31,03% kategori Baik dan mencapai target,
- 5 Indikator atau 17,24% kategori Baik tetapi belum mencapai target,
- 1 indikator atau 3,45% kategori kurang
- 5 indikator atau 17,24% indikator tidak tersedia data.





Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja tahun pertama yang tercantum dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021, dan khususnya untuk tahun 2017 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Denpasar Perubahan Tahun 2017 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kota Denpasar kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder sataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Denpasar.

Denpasar, 30 Maret 2018

Bt. Walikota Denpasar



Dusti Ngurah Jaya Negara





LAMPIRAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 2017

-111





WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

JABATAN : WALIKOTA DENPASAR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Denpasar, 10 Januari 2017



WALIKOTA DENPASAR

IB RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

**PERJANJIAN KINERJA KOTA DENPASAR
TAHUN 2017**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2017
1		2		3	4
1	Memperkuat keberadaan lembaga-lembaga tradisional	1	Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan	Hektar	2.413
		2	Indeks Tri Hita Karana	Indeks	79,81
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A
3	Mengentaskan Kemiskinan	4	Angka Kemiskinan	Persen	2.12%
4	Mengurangi Pengangguran	5	Angka Pengangguran	Persen	3,45
5	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,16
6	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	7	Indeks Pendidikan	Indeks	N/A
7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	8	Indek Pembangunan Gender/IPG	Persen	78%
		9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Persen	60%
		10	Katagori Kota Layak Anak	Kategori	Nindya
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	11	Luas permukiman kumuh	Persen	1,65%
9	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	12	Jalan Kondisi Baik	Persen	60,66
		13	Titik Genangan	Persen	10
		14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi	Persen	44,76

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2017
1		2		3	4
		15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi	Persen	47,64%
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,5
		17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	WTP
		18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B
11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persen	3
		20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	Persen	6
12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat	Persen	100
13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil	Persen	0,50
		23	Koperasi yang SHU-nya meningkat	Persen	60
14	Meningkatnya nilai investasi	24	Investasi yg tercatat di PTSP	Persen	2,5
15	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	548,813
		26	Lama Tinggal Wisatawan		
			- Asing	Hari	3,12
			- Domestik	Hari	3,00
		27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak	Juta rupiah	287.571,14

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2017
1		2		3	4
			Restoran, Pajak Hiburan		
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	28	Sampah tereduksi	Persen	22
		29	Indeks LH	Indeks	N/A

Jumlah Anggaran Tahun 2017 : **Rp. 2.055.069.223.179,33** (Dua Triliun Lima Puluh Lima Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Sembilan Rupiah koma Tiga Puluh Tiga Sen.



WALIKOTA DENPASAR

IBRAHIM DNARMAWIJAYA MANTRA



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

JABATAN : WALIKOTA DENPASAR

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Denpasar, 24 Agustus 2017



WALIKOTA DENPASAR

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

**PERJANJIAN KINERJA KOTA DENPASAR
TAHUN 2017**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2017
1		2		3	4
1	Memperkuat keberadaan lembaga-lembaga tradisional	1	Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan	Hektar	2.413
		2	Indeks Tri Hita Karana	Indeks	79,81
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A
3	Mengentaskan Kemiskinan	4	Angka Kemiskinan	Persen	2.12%
4	Mengurangi Pengangguran	5	Angka Pengangguran	Persen	3,45
5	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,16
6	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	7	Indeks Pendidikan	Indeks	N/A
7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	8	Indek Pembangunan Gender/IPG	Persen	78%
		9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Persen	60%
		10	Katagori Kota Layak Anak	Kategori	Nindya
8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	11	Luas permukiman kumuh	Persen	1,65%
9	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	12	Jalan Kondisi Baik	Persen	60,66
		13	Titik Genangan	Persen	10
		14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi	Persen	44,76

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2017
1		2		3	4
		15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi	Persen	47,64%
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,5
		17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	WTP
		18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B
11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Persen	3
		20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	Persen	6
12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat	Persen	100
13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil	Persen	0,50
		23	Koperasi yang SHU-nya meningkat	Persen	60
14	Meningkatnya nilai investasi	24	Investasi yg tercatat di PTSP	Persen	2,5
15	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	25	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	548,813
		26	Lama Tinggal Wisatawan		
			- Asing	Hari	3,12
			- Domestik	Hari	3,00
		27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak	Juta rupiah	287.571,14

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2017
1		2		3	4
			Restoran, Pajak Hiburan		
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	28	Sampah tereduksi	Persen	22
		29	Indeks LH	Indeks	N/A

Jumlah Anggaran Tahun 2017 : **Rp. 2.280.383.206.906,85** (Dua Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah koma Delapan Puluh Lima Sen.


 WALIKOTA DENPASAR

 I B PAI DNARMAWIJAYA MANTRA



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/201M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Denpasar 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1) ;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar;
3. Walikota adalah Walikota Denpasar;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kota Denpasar;
5. Tujuan adalah adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat

yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya berupa personil sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut;
9. Keluaran *output* adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan;
10. Hasil *outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan;
11. Indikator Kinerja Utama *Key Performance Indicator* yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Denpasar dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk :

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

Pendahuluan dan IKU di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini :

- a. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar diberikan tugas untuk mengumpulkan, menyusun dan merumuskan hasil *review* akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar;
- b. Inspektorat Kota Denpasar melakukan *review* atas pencapaian kinerja setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ; dan

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini serta melaporkan kepada Walikota Denpasar.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2018



Plt. Walikota Denpasar

Crusti Ngurah Jaya Negara

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 2018



Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Drs. A.A. Ngurah Rai Iswara, Msi

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 16 TAHUN 2018
TANGGAL 27 MARET 2018
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan. Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama. Penyusunan Indikator Kinerja Utama *Key Performance Indicators* atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu

peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kota Denpasar beserta Perangkat Daerah menyusun Indikator Kinerja Utama dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah. Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari indikator capaian kinerja utama sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam Pasal 3 antara lain disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing, dan pasal 4 (3) disebutkan antara lain Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah Kota Denpasar perlu diformalkan dalam bentuk Peraturan Walikota, dimana Indikator Kinerja Utama ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen tolok ukur kinerja utama, juga untuk menunjukkan target-target yang harus dicapai berdasarkan tolok ukur indikator kinerja yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sasaran penyusunan Indikator

Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai tolok ukur kinerja utama baik itu di Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Sekretariat DPRD Kota Denpasar, Inspektorat Kota Denpasar, Dinas Daerah Kota Denpasar, Badan Daerah Kota Denpasar, Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis, dan Rumah Sakita Daerah Kota Denpasar berupa indikator pelaksanaan sasaran/program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD). Penyusunan Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 melalui kompilasi seluruh kegiatan strategis dari seluruh Perangkat Daerah. Oleh karena itu Indikator Kinerja Utama ini memuat Aspek, Fokus, Indikator dan Penjelasan tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dari pemerintah Kota Denpasar yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil *outcome* sebagaimana telah direncanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021, Arah Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Skala Prioritas APBD Kota Denpasar berdasarkan bidang kewenangan pemerintahan.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar 2017 Nomor 3);

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar mencakup indikator kinerja utama atas sasaran, program dan kegiatan utama Kota Denpasar yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah (Bagian - bagian di lingkungan Sekretariat Daerah), Dinas Dinas, Lembaga Teknis Daerah (Badan dan Kantor) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Indikator Kinerja Utama memuat tolok ukur kinerja atas Aparatur, Program-Program Utama, Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada keluaran (output) maupun hasil (outcome) untuk indikator masing-masing Sekretariat (Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah), serta Lembaga Teknis Daerah (Badan dan Kantor), Dinas-Dinas yang meliputi Perangkat Daerah pada Tabel berikut.:

Tabel 1.1
Perangkat Kota Denpasar

No	Perangkat Daerah
1	2
1	Sekretariat Daerah Kota Denpasar : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Denpasar 2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Denpasar 3. Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar 4. Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar 5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Denpasar 6. Bagian Umum Setda Kota Denpasar 7. Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar 8. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar 9. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar 10. Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Denpasar
2	Sekretariat DPRD Kota Denpasar
3	Inspektorat Kota Denpasar
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
8	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
10	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar
11	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
12	Dinas Kesehatan Kota Denpasar
13	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar

No	Perangkat Daerah
1	2
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
15	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar
16	Dinas Perhubungan Kota Denpasar
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar
20	Dinas Sosial Kota Denpasar
21	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
22	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar
23	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar
27	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
28	Dinas Pertanian Kota Denpasar
29	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
30	Dinas Pariwisata Kota Denpasar
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
32	RSUD Wangaya
33	Camat Denpasar Barat
34	Camat Denpasar Timur
35	Camat Denpasar Selatan
36	Camat Denpasar Utara

D. SISTEMATIKA

Adapun Sistematika penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pemerintah Kota Denpasar menyusun Indikator Kinerja Utama sebagai gambaran informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam manajemen kinerja yang baik. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama *Core Area* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah.

Beranjak dari kenyataan arah perkembangan masyarakat Kota Denpasar tumbuh menjadi masyarakat kreatif karena digerakkan oleh Visi "**DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN**" karena itu tidak berlebihan bila pada periode 2016-2021 Kota Denpasar dicanangkan menjadi Kota Kreatif. Untuk menguatkan pondasi Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif pada tahun 2016-2021, dibutuhkan strategi kreatif dan inovatif, diantaranya aplikasi industri kreatif berbasis budaya unggulan secara sistimatis, partisipatif dan berkelanjutan (*sustainable*).

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah untuk menggambarkan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Selain itu penetapan indikator kinerja utama ditujukan untuk untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar dibagi menjadi 3 (tiga) Aspek Utama dan 13 (Tiga Belas) Sasaran yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Kota Denpasar yaitu :

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat yang terdiri dari 4 fokus utama yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan
2. Ketahanan Pangan
3. Kesejahteraan Rakyat
4. Kebudayaan dan Pariwisata

B. Aspek Pelayanan Umum yang terdiri dari 4 fokus utama yaitu:

1. Pendidikan dan Olah Raga
2. Kesehatan
3. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
4. Politik, Hukum dan Keamanan dan Ketertiban

C. Aspek Daya Saing Daerah yang terdiri dari 5 fokus utama yaitu:

1. Perekonomian
2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
3. Lingkungan Hidup
4. Iklim Berinvestasi
5. Kreativitas dan Inovasi

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar terdiri dari 13 fokus yang menjadi prioritas pembangunan Kota Denpasar yaitu :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Ketola pemerintah yang Baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur.
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha.
8. Lingkungan Hidup dan Pengelola Bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan Inovasi
11. Politik, Hukum dan Keamanan dan Ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan Rakyat.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar dan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, disampaikan pada Lampiran II.

BAB III PENUTUP

Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar merupakan media peningkatan kinerja Pemerintah dimana setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar menetapkan indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengembangan Indikator Kinerja Utama tersebut akan terus diupayakan diantara masing-masing Perangkat Daerah, sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pencapaian kinerja dan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Indikator kinerja utama akan disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian kinerja dimasing-masing perangkat daerah pelaksana kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Dalam perumusan dan penetapan indikator kinerja utama tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja dilingkup perangkat daerah, pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021.



Plt. Walikota Denpasar

Custi Ngurah Jaya Negara

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 16 TAHUN 2018
 TANGGAL 27 MARET 2018
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 DENPASAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

No	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	PENJELASAN
1	2		3		4	5
1	Menguatkan jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali	1	Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional	1	Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan (ha)	Areal lahan pertanian yang dapat dipertahankan akibat alih fungsi lahan
				2	Indeks Tri Hita Karana	Mengambarkan keberhasilan dalam membangun sikap hidup masyarakat yang seimbang antara memuja. Tuhan dengan mengabdikan pada sesama manusia, serta mengembangkan kasih- sayang pada sesama manusia serta mengembangkan kasih sayang pada alam lingkungan

No	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	PENJELASAN
1	2		3		4	5
		2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Menggambarkan keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya (kebhinnekaan) untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya.
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur	3	Mengentaskan Kemiskinan	4	Angka Kemiskinan	Melihat kinerja dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya
		4	Mengurangi Pengangguran	5	Angka Pengangguran (%)	Menggambarkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan
		5	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Rata rata kesempatan hidup atau waktu hidup yang tersisa
		6	Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	7	Indeks Pendidikan	Mencerminkan hasil pembangunan bidang pendidikan

No	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	PENJELASAN
1	2		3		4	5
		7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	8	Indek Pembangunan Gender/IPG	Indeks yang digunakan untuk mengukur ketimpangan antara laki laki dan perempuan dalam mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan
				9	Indek Pemberdayaan Gender/IDG	Indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.
				10	Katagori Kota Layak Anak	Menggambarkan pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.
		8	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	11	Luas permukiman kumuh (%).	Menggambarkan upaya/penanganan untuk mengurangi kekumuhan kawasan permukiman.

No	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	PENJELASAN
1	2		3		4	5
		9	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	12	Jalan Kondisi Baik (%).	Panjang jalan yang memenuhi kreteria kondisi jalan baik.
				13	Titik Genangan (%)	Untuk melihat keberhasilan dalam mengatasi titik genangan.
				14	Rumah Tangga terakses sistem jaringan sanitasi (%)	Menggambarkan keberhasilan dalam pemenuhan rumah tangga terhadap akses jaringan sanitasi.
				15	Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi (%)	Menggambarkan keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang terlindungi
3	Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Untuk melihat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
				17	Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori).	Menggambarkan Tertib administrasi, tertib pengelolaan aset dan keuangan.
				18	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Katagori).	Tingkat akuntabilitas atau tanggungjawab atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

No	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	PENJELASAN
1	2		3		4	5
4	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan	11	Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan	19	Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB (%)	Melihat perkembangan kontribusi sektor Industri pengolahan dalam pembentukan PDRB.
				20	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB (%)	Melihat perkembangan kontribusi sektor perdagangan dalam pembentukan PDRB.
		12	Meningkatnya kinerja Lembaga Perkreditan Desa	21	Lembaga Perkreditan Desa Sehat (%).	Menggambarkan kinerja terhadap penguatan lembaga adat dalam peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat.
		13	Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil	22	Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil (%).	Menggambarkan kinerja terhadap upaya penguatan kapasitas usaha kecil
				23	Koperasi yang SHU-nya meningkat (%).	Menggambarkan kinerja terhadap upaya penguatan kapasitas koperasi
		14	Meningkatnya nilai investasi	24	Investasi yg tercatat di PTSP	Menggambarkan perkembangan ekonomi daerah yang layak untuk investasi

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN		
1	2	3	4	5		
		15	Meningkatkan Pariwisata berbasis budaya	25	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	Menggambarkan perkembangan sekor pariwisata
				26	Lama Tinggal Wisatawan - Asing - Domestik	Menggambarkan tingkat kunjungan ke obyek daya tarik wisata
				27	Jumlah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan (dalam jutaan rupiah)	Menggambarkan jumlah uang yang dibelanjakan di daerah
5	Menguatkan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan	16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	28	Sampah tereduksi (%)	Jumlah sampah yang dihasilkan dikurangi dengan jumlah sampah yang dibawa ke TPA

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN
1	2	3	4	5
	manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa		29 Indeks LH	Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.



Plt. Walikota Denpasar

Crusti Ngurah Jaya Negara



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Maruti No 8 Denpasar 80115
Tel. (0361) 413357 | Fax. (0361) 421822
Email : bappeda@denpasarkota.go.id
www.denpasar.go.id